

NOTULENSI DISKUSI

RAPAT KOORDINASI PENCAPAIAN TARGET LUAS TAMBAH TANAM (LTT) PADI BULAN
JANUARI 2026 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(berdasarkan Surat Undangan BBRMP Kalbar Nomor B-048/LB.010/H.12.16/01/2026 tanggal 22 Januari 2026)

Hari/Tanggal	:	Kamis, 22 Januari 2026
Metode Rapat	:	Luring dan Daring melalui Zoom Meeting Room
Meeting ID	:	89758620493 Passcode: LTT2026
Moderator Diskusi	:	Anjar Suprpto, S.T.P., M.P. (Plt Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat)
Und & Daftar Und	:	<i>Terlampir</i>
Tempat	:	Ruang Rapat Kecil BBRMP Kalbar Jl. Budi Utomo No. 45, Pontianak Utara, Prov. Kalimantan Barat

Dalam rangka mendukung swasembada pangan di Prov. Kalimantan Barat, BBRMP Kalbar mengadakan Rapat Koordinasi Pencapaian Target Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Bulan Januari 2026 pada kegiatan Optimasi Lahan (OPLAH), Non OPLAH, CSR, dan Padi Gogo yang diselenggarakan secara online melalui zoom meeting.

Rakor dihadiri oleh Sesditjen TP Kementan, BBPP Batu, Kadis TPH Prov. Kalbar, Dinas Pertanian Kab/Kota di Kalbar, Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Prov. Kalbar, Katimker Penyuluh, Koordinator BPP, dan Pencatat Data LTT Kab/Kota se-Kalbar.

Pembukaan oleh Kepala BBRMP Kalbar (Anjar Suprpto, S.T.P., M.P)

LTT Kalbar saat ini masih di zona merah. Dirasa sangat perlu rapat koordinasi utk provinsi. Pertemuan cukup penting, sudah record absen.

Tugas tugas penyuluh untuk mendampingi dan mensukseskan swasembada pangan berkelanjutan. Data LRT penting sg bukti produksi padi/pangan di Kalbar dibuktikan dgn data tanam yg akan menjadi data produksi. Rapat koordinasi pada pagi hari bisa menghasilkan sesuatu yang akan bisa mengoptimalkan kinerja dari provinsi Kalbar khususnya terkait data LTT. Terkait posisi BRMP sampai dgn saat ini, baru mendapatkan tugas utk koordinasi terkait dgn bergabungnya penyuluh 1123 sementara masih di bawah BSDM s/d saat ini sbg fungsi koordinasi antar pusat dan pemerintah daerah. Diharapkan arahan Kadis TPH utk strategi di Kalbar dalam rangka melaksanakan tugas-tugas/ program strategis Kementerian di Kalbar khususnya terkait LTT datanya berasal dari penyuluh.

Sambutan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Ir. Herti Herawati, M.M.A.)

LTT Kalbar masih di zona merah, perlu upaya khusus di antaranya yaitu realisasi CSR utk 100%, bantuan2 dari pusat utk benih CSR. Bantuan benih lahan OPLAH 2024 2025, padi gogo, pompanisasi, benih padi inbrida. Dengan beralihnya status penyuluh harus ada penyesuaian pola kerja terkait efisiensi pola kerja. Penyuluh sudah bisa diinstruksikan langsung dari Kementan, pendataan apapun langsung ke aplikasi Kementan. Provinsi berharap kemudahan akses data. Persiapan s.id dan cetak sawah juga telah melibatkan penyuluh mulai dari sekarang. Utk mendata calon s.id, mengikutsertakan penyuluh. Agar bisa lebih efisien dan kolaboratif dgn dinas pertanian provinsi.

Sambutan Sekretaris Ditjen TP Kementerian Pertanian RI (Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P).

Ada beberapa hal ygingin disampaikan, mari kita bangun kekompakan solidaritas. Dinas kabupaten dinas provinsi, padi, polri, AL (kedelai). Tim akan disusun oleh Kementan lintas eselon I. agar bekerja lebih terarah, untuk mengekstrak seluruh

stakeholder. Tujuan akhirnya adalah swasembada pangan. Data LTT atau KSA lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun kita belum boleh puas karna swasembada pangan harus berkelanjutan. Yg kedua, tugas tim dgn gol akhir yaitu swasembada pangan. Ada intermediate goal diminta mensukseskan semua program kementan harus disukseskan bersama termasuk oplah cetak sawah dll. Strategi yg pertama yaitu akan berupaya meningkatkan IP dgn cara ditentukan keberhasilan di musim gadu dan kemarau. Apabila musim rendeng hanya menjaga agar tidak turun. Karna ini adalah musim penentu IP, bantuan akan didorong di musim kemarau. CPCL secara berjenjang, diverifikasi oleh Katimker lalu ke BRMP. Lebih jelas untuk dipelajari juknisnya. Rekan PJ utk mengawal CPCL di wilayah masing-masing agar bisa diajukan di awal. Berikutnya CPCL telah disusun, harus dikawal sampai ke pusat dan dinyatakan selesai apabila pusat telah menyatakan clear and clean oleh eselon I bersangkutan. Dilakukan revisi secepat mungkin. Begitu CPCL dinyatakan C&C akan dikawal agar bisa segera didistribusikan. Prioritas di CSR dan OPLAH. Benih di Kalbar prioritasnya yaitu *insitu*.

Strategi kedua yaitu waspada terhadap ketidakpastian (iklim), curah hujan terlalu tinggi/genangan tinggi tidak dapat melakukan percepatan. Mohon diidentifikasi titik kritis, seperti pintu air jebol. Bantuan pompa sudah banyak dari tahun 2024, mohon utk disiagakan. Agar selalu mengikuti perkembangan di BMKG. Dan juga resiko OPT, apabila ada gejala serangan mohon segera dilapor.

Strategi lainnya yaitu harus mampu mengidentifikasi masalah di lokasi masing-masing dan segera koordinasikan ke pihak terkait utk mengatasi permasalahan tersebut.

Berikutnya, dari awal mengidentifikasi masalah harga. Sergap dgn harga 6500. Inpresnya sedang dibahas. Hal baru di inpres yaitu Any quality dgn syarat dipanen sesuai dengan umur panen. Momen emas sergap yaitu saat bulan Maret.

Punya stok 3 juta, apabila bisa dipertahankan panen seperti tahun lalu kita dapat melakukan ekspor beras.

Diharapkan pupuk juga dikawal, apabila ada kekurangan agar segera dilaporkan. Apabila ada penyimpangan agar harap dilaporkan pula, dijual sesuai dengan HET.

Diharapkan penyuluh sudah familier dengan penggunaan SISCROP, diupdate 2 kali dalam sebulan (tgl 15 dan 30). Veg 1 umurnya kurang dari 41 HST, bukan semai.

Veg 1 < 41 hari, Veg 2 41-65 HST, Gen 1 65-92 HST, Gen 2 > 92 HST.

Informasi terkait benih pada program Oplah, Cetak Sawah.

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	KRITERIA KEGIATAN																
		OPLAN 2024				OPLAN 2025						CETAK SAWAH 2025						
		Usulan CPCL (ha)	Kontrak (ha)	Realisasi Salar (ha)	Realisasi Tanam (ha)	Usulan CPCL (ha)	Kontrak (ha)	Realisasi Salar (ha)	Realisasi Tanam APBN (ha)	Realisasi Tanam Swadaya/ APBN Lainnya	Total Realisasi Tanam (ha)	Usulan CPCL (ha)	Kontrak (ha)	Realisasi Salar (ha)	Realisasi Tanam APBN (ha)	Realisasi Tanam Swadaya/ APBN Lainnya	Total Realisasi Tanam (ha)	
20	Kalimantan Barat	36.370	36.370	36.370	5.189	5.974	5.974	5.974	0	0	0	1.343	1.138	1.138	4	13	17	
	Kab. Sambas Tahap I	8.078	8.078	8.078	1.134	1.916,00	1.916,00	1916				0	266,00	266,00	266,00			0
	Kab. Sambas Tahap II	1.135	1.135	1.135								0						0
	Kab. Sambas Tahap III	4.413	4.413	4.413				4.413				0						0
	Kab. Sambas Tahap IV	831	831	831								0						0
	Kab. Sambas Tahap V	400	400	400								0						0
	Kab. Sanggau	500	500	500	50							0	100,00	100,00	100,00	2		2
	Kab. Sintang	2.000	2.000	2.000	2.000							0	128,00	128,00	128,00			0
	Kab. Mempawah Tahap I	460	460	460	142							0	380,00	380,00	380,00			1
	Kab. Mempawah Tahap II	2.090,00	2.090	2.090				2.090				0						0
	Kab. Sanggau	1.238,00	1.238	1.238	5							0	264,00	264,00	264,00	2		2
	Kab. Ketapang	8.768	8.768	8.768		500,00	500	500				0						0
	Kab. Sintang	569	569	569								0						0
	Kab. Kapuas Hulu	1.387	1.387	1.387								0						0
	Kab. Sekadau	1.549	1.549	1.549	528							0					12	12
	Kab. Melawi	900,00	900	900								0	205,00					0
	Kab. Kayong Utara	1.552	1.552	1.552	1.243							0						0
	Kab. Kubu Raya	500	500	500	87	3175	3175	3175				0						0
	Kota Pontianak											0						0
	Kota Singkawang Tahap 1					257,00	257,00	257				0						0
	Kota Singkawang Tahap 2					126	126	126				0						0

LBS DESA X TARGET JANUARI			
File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help			
Kecamatan			
A	B	C	J
1532	SINTANG	TEMPUNAK	0.00
			5999.51
			10687.00
			3777.00
			18.00
			12927.51
			22285.00
			58.01
			16686.51
			12909.51

Arahan Pak Ses

Laporan yg masih 0 di desa/kecamatan mohon dicrosscheck dgn aplikasi SISCROP. Jangan sampai tidak terlapor.

Syahrudin (Ketapang): LBS di Kab. Ketapang: 5900. 4800 dibagi per 10 bulan.

Di awal februari aka nada revisi 3777, capaian januari sekitar 12.997 ha.

Kriteria 1: lebih tinggi dibanding tahun lalu di bulan yg sama

Kriteria 2: harus warnanya kuning dari target.

Teman-teman yg sudah mengisi kesanggupan, diisi lewat epusluh.

Data terakhir 10.000an, apabila ditambah 1000 akan memasuki zona kuning.

Pak Budi (Pontianak).

Lahan di luar LBS juga harus diidentifikasi.

Kita harus punya data LBS yang lebih presisi.

Perbaikan data baru bisa diperbaiki pada bulan berikutnya.

Data tersebut dapat digunakan sebagai justifikasi terkait target yang kemungkinan terlalu tinggi untuk dicapai.

Pak Anshari Katimker: terjadi perubahan luas lahan.

Pak Ses: Pergerakan tanam, hamparannya harus signifikan. Harus bekerja maksimal,

Imanuel Suprianto (BPP Ngabang): LBS ada termasuk hutan lindung. Dimohon petunjuk bagaimana penggunaan SISCROP.

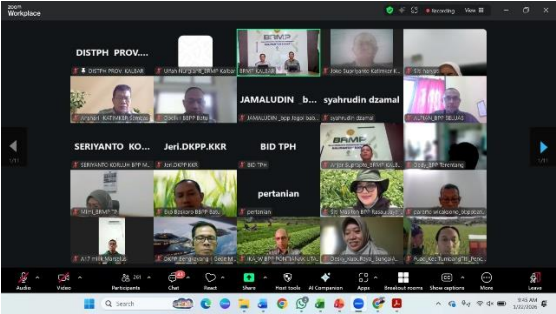
Pak Mukian: LBS bersumber dari ATR/BPN. Apakah LBS landak dari bidang PSP atau bagaimana? LBS 365 ha.

Sesdit: Wali data LBS masih di ATR/BPN.

Penuutup

Semua data yang sudah diisi di tabel, ada 6000an. Tolong alirkan datanya ke epusluh agar bisa segera masuk zona kuning. Tolong dicek yang masih 0 capaiannya, bisa dicek di SISCROP apabila Veg 1 nya besar agar bisa dicek Kembali.

Dokumentasi Kegiatan



Lampiran 1. Undangan Rakor tanggal 22 Januari 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT

Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak Utara, Kota Pontianak 78241
Telp. (0561) 882069 Fax. (0561) 883883
Website: www.kalbar.bmp.pertanian.go.id E-mail: bmp.kalbar@pertanian.go.id

Nomor : B-048/LB.010/H.12.16/01/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Rapat Koordinasi LTT Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, 20 Januari 2026

Yth.
Daftar Undangan (*Terlampir*)
di -
Tempat

Dalam rangka rapat koordinasi pencapaian target Luas Tambah Tanam (LTT) Padi bulan Januari 2026, kegiatan Optimasi Lahan (OPLAH), Non OPLAH, CSR, dan Padi Gogo mendukung swasembada pangan di Kalimantan Barat, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan hadir pada rapat dimaksud yang akan dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting room* pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 22 Januari 2026
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Zoom ID : 897 5862 0493
Password : LTT2026

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pt. Kepala Balai Besar,


Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
NIP. 197209122005011001

Tembusan :
Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta

Lampiran 1. Surat Kepala BBRMP Kalimantan Barat
Nomor : B-48/LB.010/H.12.16/01/2026
Tanggal : 20 Januari 2025
Hal : Rapat Koordinasi LTT Provinsi
Kalimantan Barat

Daftar Undangan

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau
4. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak
5. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sekadau
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang
8. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang
9. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
10. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas
11. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Melawi
13. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara
14. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang
15. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
16. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
17. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah
18. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau
19. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak
20. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sekadau
21. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya
22. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang
23. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang
24. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
25. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas
26. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
27. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Melawi
28. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara
29. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang
30. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
31. Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Provinsi Kalimantan Barat
32. Kepala Tim Kerja Penyuluh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
33. Koordinator BPP Se-Kalimantan Barat
34. Pencatat Data LTT Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Lampiran 2. Surat Kepala BBRMP Kalimantan Barat
Nomor : B-48/LB.010/H.12.16/01/2026
Tanggal : 20 Januari 2025
Hal : Rapat Koordinasi LTT Provinsi Kalimantan Barat

JADWAL TENTATIF
RAPAT KOORDINASI LTT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TA.2026

Waktu	Kegiatan	Keterangan
09.00-09.05	Pembukaan	MC
09.05-09.20	Sambutan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Kalimantan Barat	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Kalimantan Barat
09.20-09.35	Arahan dan Pembukaan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
09.35-selesai	Arahan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
	Diskusi	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
	Penutupan	

NOTULENSI DISKUSI

Rapat Koordinasi Upaya Percepatan dan Pencapaian Target Swasembada Pangan
Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat

(berdasarkan Surat Undangan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 19/SR.150/J.6/02/2026
tanggal 13 Februari 2026)

Hari/Tanggal	:	Kamis, 19 Februari 2026
Metode Rapat	:	Luring dan Daring melalui Zoom Meeting Room
Meeting ID	:	871 1877 0491 Passcode: pangankuat
Moderator Diskusi	:	Anjar Suprpto, S.T.P., M.P. (Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat)
Und & Daftar Und	:	Terlampir
Tempat	:	Aula Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Jl. Budi Utomo No. 45, Pontianak Utara, Prov. Kalimantan Barat

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat, menggelar Rapat Koordinasi Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat di Aula Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Hari Kamis Tanggal 19 Februari 2026. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Penguatan Kelembagaan Pengembangan Lahan Pertanian Rawa, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat, Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Kepala Dinas se-Kota/Kab Prov. Kalimantan Barat, Pimpinan Perum Bulog Wilayah Kalimantan Barat, Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak, Pupuk Indonesian Holding Company, Kelsi Pengelolaan Penyuluhan Pertanian, Penyuluh se-Kota/kab Kalimantan Barat, dan yang hadir secara daring.

Sambutan Kepala BRMP Kalimantan Barat (Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.)
Menurut Kepmentan No.166/Kpts./PW.020/M/02/2026 PJ Prov. Kalimantan Barat yg sebelumnya Sesditjen TP Kementan Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P., menjadi Direktur Konservasi Sumber Daya Air Pertanian Dirjen LIP yaitu Dr. Asmarhamsyah, S.P., M.Sc. Selain itu, PJ untuk Brigade Pangan tetap dari Balai Besar Pelatihan Batu, namun PJnya berganti menjadi Dr. Ir. Ugik Romadi, S.ST., M.Si. Kalbar memiliki lokasi yang terjauh yaitu Kapuas Hulu jika menggunakan perjalanan darat sekitar 17 jam dan Ketapang sekitar 12 jam, serta Kab. Kayong Utara berada di seberang sungai ke lokasi cukup jauh, selain darat juga ada. Luas Baku Sawah (LBS) Tahun 2023 Prov. Kalimantan Barat yaitu 200.499 Ha sedangkan Tahun 2019 sekitar 242.972 Ha berkurang sekitar 40.000 Ha untuk LBS, namun beberapa wilayah berdasarkan data tanam bisa melebihi SBS, ada lahan yang tidak masuk LBS dan ada lahan sawah.

Sambutan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Ir. Herti Herawati, M.M.A.)
Melalui rakor ini menekankan beberapa hal yang penting, pertama harus ada data validasi data luas tanam dan panen yang akurat, peningkatan Indeks Pertanaman harus menjadi prioritas. Jumlah pupuk dan benih harus profesional dan linier dengan CSRnya. Penguatan dinas provinsi, TNI, daerah, dan penyuluh yang sudah bergabung dengan pusat harus lebih intens lagi dan memberikan kinerja yang lebih tangguh. Serta dukungan BULOG dalam penyerapan gabah untuk mendukung Swasembada Pangan. 6.100 ton Gabah dinaikkan dari tahun lalu yaitu 2x lipat 101%. Optimalisasi bantuan pemerintah agar serta tepat sasaran. Swasembada Pangan berkelanjutan bukan tentang peningkatan produksi namun kelanjutan Swasembada Pangan yang tidak terjadi alih lahan. Pendekatan yang dibangun harus terintegrasi dari hulu sampai hilir. Selain itu, di Kalimantan Barat rentan ahli fungsi lahan. Pendekatan pembangunan terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui rapat ini kita menyepakati pembagian peran yang jelas. Harus ada output membicarakan pembagian yang jelas di lapangan untuk jadi

kunci keberhasilan bersama. Infonya dinaikkan 20.000 ha, kalau di RKKL cetak sawah 7.001 ha, 1006 ha. Tim SID bisa menepis lahan Aol secara akurat, tidak terlalu bias ke lahan cetak sawah, sehingga tidak banyak terjadi lahan yang tidak sesuai kriteria.

Sambutan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Penguatan Kelembagaan Pengembangan Lahan Pertanian Rawa (Dr. Ir. I Gusti Made Subiksa)

Dalam konteks Swasembada Pangan Berkelanjutan Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa terima kasih atas capaian Swasembada Pangan tahun ini dan itu tentu atas kerja keras semuanya. Baik ditingkat pusat maupun daerah sebagai ujung tombaknya. Untuk mempertahankan Swasembada Pangan membutuhkan effort yang lebih keras lagi. Sudah ada dipundak kita semua, sehingga kita harus bekerja keras. Untuk mencapai sesuatu yang berbeda makan mindset kita harus berbeda, kita harus bekerja lebih agar mendapatkan hasil yang lebih juga. Untuk saat ini Kalimantan Barat sudah masuk zona hijau dan menjadi peringkat pertama, mudah – mudahan sampai akhir bulan ini Kalbar akan selalu hijau dan jangan lengah. Program OPLAH dan CSR, untuk dikawal diletakan tanggung jawab besar kepada kita semua.

Pak Menteri selalu menanyakan apa saja kontribusi dari OPLAH yang sudah digelontorkan ke 14 provinsi terhadap penambahan LTT maupun produksi. Masih menjadi pertanyaan besar untuk kita semua, kenapa lahan yang sudah kita beri bantuan tetapi peningkatan IP dan produksinya belum signifikan. Untuk musim ini, barangkali OPLAH bisa terjawab karena masuk musim reguler, namun untuk panen yang akan datang jika tidak bisa mengangkat maka akan menjadi pertanyaan Pak Menteri. Oleh karena itu, kita rubah mindset kita agar tidak seperti itu algi. Barangkali benchmarknya daerah Ketapang sudah 2 semoga menjadi 3. Jika kita sudah OPLAH seharusnya menjadi 3. Seperti daerah Sanggau dan sekitarnya yang IPnya 1, semoga pada musim ini ada tanam agar ada dampaknya. Dari laporan – laporan ini belum terlihat nyata. RPATA tinggal satu Kabupaten semoga hingga 31 Maret 2026 bisa diselesaikan. CSR 2026 sudah menunggu. Bapak/Ibu semuanya untuk dikawal dengan baik dimulai dari SID yang valid. Kadang – kadang berdasarkan Aol dari citra perlu dilihat secara detail Aol yang ada, sebelum dilakukan SID. Tahun 2026 ini cetak sawah 20.000 ha. SID dibuat betul – betul komprehensif bisa dilakukan dengan baik oleh pelaksana, mana yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan.

Sambutan dan membuka acara oleh PJ Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat (Dr. Asmarhamsyah, S.P., M.Sc.)

Pada tahun 2025 kita sudah mewujudkan Swasembada Pangan dan Pak Presiden sudah mengumumkan hal tersebut. Dengan berkelanjutan sehingga harus terus berjalan di tahun – tahun selanjutnya. Pada tahun ini kita harus ekspor 1 jt ton. Dalam rangka lumbung pangan dunia, maka market pangan 40 juta ton, kalo kita 10% nya saja itu 4 juta, kita awali dengan 1 juta. Untuk 2026 Swasembada Pangan Berkelanjutan tidak terkait LTT, tetapi juga sudah memasukan target serap gabah, serap jagung, serap pupuk bersubsidi. Untuk meningkatkan pendapatan petani dan menggairahkan petani untuk menanam sehingga Swasembada Pangan akan berkelanjutan. Termasuk serap pupuk bersubsidi sudah berkordinasi kemarin di PIHC Kalbar. Saya sangat berharap sinergi untuk mewujudkan keberlanjutan ini. Nanti akan ada sharing discussion untuk membahas ini secara bersama – sama untuk peran kita semua, mulai dari PJ Swasembada, BWS, BULOG, PIHC, BBPP Batu. Untuk membahas Brigade Pangan penting karena tujuan utamanya untuk meningkatkan Indeks Pertanaman. Menjadi catatan kita peran BP. Sebelumnya Bapak Dr. Ir. I Gusti Made Subiksa membahas bagaimana pentingnya SID. Bagaimana kita memadukan data kementan dengan data di BWS. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan harapannya adanya dukungan dan komitmen kedepannya.

Diskusi yang dipandu oleh Moderator yaitu Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Kalimantan Barat (Anjar Suprpto, S.P., M.P.)

Paparan dan Diskusi:

1. PJ Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat (*Program Swasembada Pangan Berkelanjutan*) (Dr. Asmarhamsyah, S.P., M.Sc.)

Bapak Dr. Asmarhamsyah memaparkan PJ Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalbar dan Kab/Kota Kalbar berdasarkan Kepmentan 166/kpts/PW.020/M/20/2026. Dengan target sebagai berikut:

TARGET KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Kepmentan 166/Kpts./PW.020/M/02/2026)									
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	LTT Reguler (Ha)	Cetak Sawah (Ha)	BP Cetak Sawah	LTT Padi Gogo (Ha)	Luas Panen Padi (Ha)	Serap Gabah Bulog (Ton)	Serap Jagung Bulog (Ton)	Serap Pupuk Subsidi (Ton)
Kalimantan Barat		235.986	7.100	36	40.473	190.598	5.101	16.400	181.378
1.	Sambas	56.781	550	3	1.491	47.598			37.521
2.	Bengkayang	13.208	450	2	2.174	10.350			23.054
3.	Landak	80.717	500	3	11.408	65.820			54.600
4.	Mempawah	11.024	500	3	220	8.997			4.200
5.	Sanggau	17.480	-	-	8.343	13.185			20.250
6.	Ketapang	4.366	1.000	5	1.034	3.412			15.570
7.	Sintang	6.776	500	3	1.500	5.072			5.710

TARGET KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Kepmentan 166/Kpts./PW.020/M/02/2026)									
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	LTT Reguler (Ha)	Cetak Sawah (Ha)	BP Cetak Sawah	LTT Padi Gogo (Ha)	Luas Panen Padi (Ha)	Serap Gabah Bulog (Ton)	Serap Jagung Bulog (Ton)	Serap Pupuk Subsidi (Ton)
8.	Kapuas Hulu	10.216	850	4	3.701	8.390			653
9.	Sekadau	4.875	950	5	1.291	3.805			3.332
10.	Melawi	2.894	500	3	9.300	2.163			7.932
11.	Kayong Utara	7.000	500	3	-	5.451			2.250
12.	Kubu Raya	13.379	600	3	11	13.694			4.590
13.	Kota Pontianak	187	-	-	-	160			21
14.	Kota Singkawang	3.083	200	1	-	2.501			1.695

USULAN KEGIATAN KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR PERTANIAN (IRIGASI PERPOMPAAN, IRIGASI PERPIPAAN, DAN BANGUNAN KONSERVASI) KALIMANTAN BARAT				
No	Kabupaten/Kota	Irigasi Perpompaaan (Unit)	Irigasi Perpipaan (Unit)	Bangunan Konservasi (Unit)
1.	Sambas		4	
2.	Mempawah		7	
3.	Ketapang		62	28
4.	Kapuas Hulu		6	
5.	Landak		38	2
6.	Sekadau		2	
7.	Kayong Utara		8	
8.	Kota Pontianak		1	
9.	Kota Singkawang		24	2
JUMLAH			152	30
				84

Untuk semntara tidak ada OPLAH. Selain target – target tadi, ada usulan kegiatan dari konservasi dan pengembangan sumber air petanian (irigasi perpipaan, dan bangunan Konservasi kalimantan Barat). Tiga kegiatan ini harus dilakukan segera untuk mengantisipasi terjadinya kemarau. Pada saat musim kemarau, maka manfaatnya bisa dirasakan. Apabila sudah dieksekusi, maka melalui kegiatan ini tidak akan menjadi masalah. Maka LTT mampu kita pertahankan, kita sudah hijau tapi kita tidak boleh lengah. Pelibatan penyuluh sudah melingkupi kabupaten dan

dinas pertanian dan BRMP juga. LTT reguler perlu indentifikasi dan validasi luas tanam per desa dan kecamatan. Untuk hal ini dari PJ provinsi dan penyuluh, kita sudah menyiapkan LBS masing – masing Kabupaten. Kita distribusikan menggunakan aplikasi Avenza, bapak ibu berdiri di lahan sawaha apakah lahan sawah tersebut sudah tercatat di lahan LBS atau belum. Catatan untuk LTT Reguler:

1. Identifikasi data potensi Luas Tanam per desa dan per kecamatan sehingga dibuatkan peta LBS dari masing – masing Kabupaten menggunakan aplikasi Avenza untuk penyuluh, dengan cara berdiri di lahannya dan nanti terdeteksi lahan tersebut lahan apa. Percepatan bantuan benih harus dipercepat ke Direktorat Serelia, harus ada CPCL terlebih dahulu. Optimalisasi insfraktur air dan alsintan, jaringan tersier dari Dirjen LIP harus dioptimalkan, pelibatan penyuluh pertanian di Prov/Kab yang harus terus membantu Gubernur/Bupati/Kadis.
2. Cetak Sawah, titik kritis Aol yang harus clean and clear dan kesesuaian lahan harus sesuai dengan kesesuaian lahan, berdasarkan juknis kedalaman gambut maks 100 cm, tidak boleh lebih dari 100 cm. Di Aol ada sharing data dengan BWS, sehingga apa yang dapat didukung oleh BWS, begitu dengan datanya yang sudah lengkap maka kegiatannya akan lebih baik. Setelah Aol selesai dilanjutkan dengan kontrak SID. Pelaksanaan SID, sosial ekonomi, tim SID harus ada dari paparan ilmu tanah, pertanian, sosial ekonomi, hidrologi dan teknik sipil. Apabila data RTRW harus diselesaikan dahulu. Dilakukan monitoring pelaksanaan SID untuk di reviu dan setelah selesai baru dilakukan ekspose. Percepatan kontrak pelaksanaan cetak sawah, dan percepatan verifikasi dan pengusulan CPCL bantuan dolomit, pupuk, dan benih. Dengan melibatkan penyuluh pertanian.
3. Brigade Pangan harus koordinasi dengan desa/kecamatan, BPP, Babinsa untuk percepatan pembentukan. Dilakukan pengawalan proposal alsintan BP, dan pelibatan penyuluh pertanian.
4. LTT Padi Gogo dilakukan percepatan verifikasi dan pengusulan CPCL dan pelibatan penyuluh.
5. Serap Gabah Bulog dengan koordinasi dengan Bulog Wilayah Kalbar/Cabang Kabupaten. Perlu diperhatikan usia panen yang harus sesuai. Bisa dilihat dideskripsi varietas (breakdown per kabupaten dan usia panen).
6. Serap Jagung Bulog harus ada koordinasi dengan Bulog Wilayah Kalbar/Cabang Kabupaten. Perlu diperhatikan usia panen yang harus sesuai.
7. Serap pupuk subsidi terutama terkait ketersediaan, jangan sampai petani siap olah lahan, pupuk tidak siap. Namun hasil diskusi pupuk akan selalu siap. Harga pupuk sudah turun 20%, dan dicek serapan dan masa tanam yang harus sinkron.

2. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I (*Program rehab dan pembangunan jaringan irigrasi 2026 di Kalimantan Barat*) (M. Tahid S.T., M.P.P.M.)



Daerah irigasi dan irigasi rawa, satu kesatuan lahan pertanian yang mendapatkan air dari sistem jaringan irigasi. Komponen utamanya harus ada sumber air (sungai, danau, air hujan, air tanah), bangunan utama (bendungan), saluran primer, sekunder, tersier dan cetak sawah. Air tanah boleh menjadi sumber air, namun harus diperhatikan cekungan air tanah di sana. Lahan pertanian yang akan diairi di PU ada luas baku, luas potensial, luas fungsional, dan jaringan irigasi. Luas potensial, harus ada sumber airnya. Tiga daerah irigasi, irigasi yang teknis IP nya sudah 2, karena sistemnya sudah bagus, ada bendungan, ada alat pemutar, ada alat pengukurannya. Untuk mengatur distribusi air, IP nya minimal 2 atau 3. Bangunan utama dan permanen. Supaya target IP tersebut tercapai. Untuk IP 1,5 dilakukan semi irigasi. Lalu irigasi sederhana, tanpa pintu pengatur biasanya untuk IP 1.

DAERAH IRIGASI / DAERAH IRIGASI RAWA
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
DAERAH IRIGASI RAWA KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI BERDASARKAN PERMEN 14 TAHUN 2015

KEWENANGAN PROVINSI												
NO	DI	TOTAL DI	DI USULAN	LUAS BERDASARKAN PERWEN 14	IGT (Informasi Geospasial Tematik)			KEKURANGANDATA				
					LUAS BAKU (Ha)	LUAS POTENSIAL (Ha)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	LUAS			JARINGAN	
								BAKU	POTENSIAL	FUNGSIONAL		BANGUNAN
1	LANDAK	7	-	141,00	-	-	-	7 DI	7 DI	7 DI	7 DI	7 DI
2	KAB. PONTIANAK	7	-	255,00	-	-	-	7 DI	7 DI	7 DI	7 DI	7 DI
3	BENGKAYANG	2	-	2.672,00	-	-	-	2 DI	2 DI	2 DI	2 DI	2 DI
4	MELEWI	1	-	1.012,00	-	-	-	1 DI	1 DI	1 DI	1 DI	1 DI
5	SANGGAU	1	-	1.660,00	-	-	-	1 DI	1 DI	1 DI	1 DI	1 DI
6	SEKADAU	1	-	1.025,00	-	-	-	1 DI	1 DI	1 DI	1 DI	1 DI
TOTAL		1G	-	6.765,00	-	-	-					

KEWENANGAN PROVINSI												
NO	DIR	TOTAL DIR	DIR USULAN	LUAS BERDASARKAN PERMEN 14	IGT (Informasi Geospasial Tematik)			KEKURANGAN DATA				
					LUAS BAKU (Ha)	LUAS POTENSIAL (Ha)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	LUAS			JARINGAN	
								BAKU	POTENSIAL	FUNGSIONAL		SALURAN
1	BENGKAYANG	1		2.890,00	619,61	619,61	59,52	-	-	-	1 DIR	1 DIR
3	KAYONG UTARA	6		7.281,00	12.849,89	11.633,69	3.129,06	-	-	-	6 DIR	6 DIR
4	KETAPANG	6		9.500,00	13.081,82	7.158,73	6.219,76	1 DIR	-	-	6 DIR	6 DIR
5	KUBURAYA	9	1	15.560,00	31.049,90	28.192,83	7.677,81	-	1 DIR	1 DIR	10 DIR	10 DIR
6	MEMPAWAH	3		4.047,00	5.832,56	5.832,56	1.339,59	-	-	-	3 DIR	3 DIR
7	SAMBAS	10		15.242,00	18.817,02	18.817,01	185,79	-	-	-	10 DIR	10 DIR
TOTAL		35	1	54.520,00	82.250,7G	72.254,43	18.611,52					

Perbedaan antara luas fungsional yang lebih kecil dibandingkan luas potensial disebabkan :
1. Sudah ada jaringan irigasi tetapi belum ada sawah
2. Alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan, perumahan, lahan tambang, HGU, dll

Data Daerah irigasi Kewenangan irigasi :
1. Peta IGT Daerah Irigasi belum lengkap
2. Peta IGT Daerah Irigasi Rawa belum dilengkapi peta jaringan dan bangunan irigasi

DAERAH IRIGASI / DAERAH IRIGASI RAWA
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
DAERAH IRIGASI RAWA KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERMEN 14 TAHUN 2015

KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA												
NO	DI	TOTAL DI	DI USULAN	LUAS BERDASARKAN PERMEN 14	IGT (Informasi Geospasial Tematik)			KEKURANGAN DATA				
					LUAS BAKU (Ha)	LUAS POTENSIAL (Ha)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	LUAS				
								BAKU	POTENSIAL	FUNGSIONAL	BANGUNAN	SALURAN
1	KAPUAS HULU	73	-	6.166,00	6.065,11	5.109,61	1.481,53	36 DI	-	-	1 DI	1 DI
2	SINTANG	79	-	10.529,00	7.583,51	3.980,17	3.099,99	19 DI	21 DI	21 DI	79 DI	69 DI
3	SEKADAU	64	-	3.595,00	-	-	-	64 DI	64 DI	64 DI	64 DI	64 DI
4	MELEWI	48	-	2.552,00	-	-	-	48 DI	48 DI	48 DI	48 DI	48 DI
5	SANGGAU	80	2	9.599,00	-	1.532,70	4.027,32	82 DI	31 DI	31 DI	31 DI	31 DI
6	LANDAK	198	-	19.043,00	-	-	-	198 DI	198 DI	198 DI	198 DI	198 DI
7	SAMBAS	17	-	3.298,00	-	-	-	17 DI	17 DI	17 DI	17 DI	17 DI
8	SINGKAWANG	18	-	5.762,00	1.528,37	404,03	329,33	15 DI	15 DI	15 DI	15 DI	15 DI
9	BENGKAYANG	71	-	10.945,00	9.159,74	5.851,66	2.331,32	16 DI	16 DI	16 DI	22 DI	22 DI
10	MEMPAWAH	191	-	1.933,00	-	-	-	191 DI	191 DI	191 DI	191 DI	191 DI
11	KUBU RAYA	7	-	2.964,00	822,56	822,58	297,95	3 DI	3 DI	3 DI	7 DI	7 DI
12	KETAPANG	72	-	7.196,00	7.502,33	6.752,84	1.842,36	-	3 DI	13 DI	66 DI	19 DI
13	KAYONG	13	-	2.273,00	-	-	253,97	13 DI	13 DI	9 DI	8 DI	8 DI
TOTAL		G31	2	51.484,00	13.648,62	10.622,4G	8.608,84					

KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA												
NO	DIR	TOTAL DIR	DIR USULAN	LUAS BERDASARKAN PERMEN 14	IGT (Informasi Geospasial Tematik)			KEKURANGAN DATA				
					LUAS BAKU (Ha)	LUAS POTENSIAL (Ha)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	LUAS			JARINGAN	
								BAKU	POTENSIAL	FUNGSIONAL		BANGUNAN
1	BENGKAYANG	6	1	873,00	3.330,91	1.005,65	469,48	-	-	-	3 DIR	-
3	KAYONG UTARA	21	-	10.138,00	213,27	-	11.654,42	20 DIR	-	-	14 DIR	14 DIR
4	KETAPANG	10	4	4.132,00	5.580,28	5.805,28	1.972,58	-	21 DIR	1 DIR	14 DIR	14 DIR
5	KUBU RAYA	64	1	12.213,00	31.140,25	36.535,15	8.852,33	6 DIR	6 DIR	18 DIR	65 DIR	65 DIR
6	MEMPAWAH	9	-	2.235,00	2.739,30	2.612,05	1.820,64	3 DIR	4 DIR	3 DIR	9 DIR	9 DIR
7	SAMBAS	85	32	25.518,00	90.522,73	76.302,98	12.930,74	2 DIR	21 DIR	21 DIR	117 DIR	117 DIR
8	KAPUAS HULU	1	11	750,00	756,58	756,58	756,58	-	-	-	12 DIR	12 DIR
TOTAL		166	46	55.106,00	133.526,74	122.261,10	37.700,10					

Perbedaan antara luas fungsional yang lebih kecil dibandingkan luas potensial disebabkan :
1. Sudah ada jaringan irigasi tetapi belum ada sawah
2. Alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan, perumahan, lahan tambang, HGU, dll

Data Daerah irigasi Kewenangan irigasi :
1. Peta IGT Daerah Irigasi belum lengkap
2. Peta IGT Daerah Irigasi Rawa belum dilengkapi peta jaringan dan bangunan irigasi

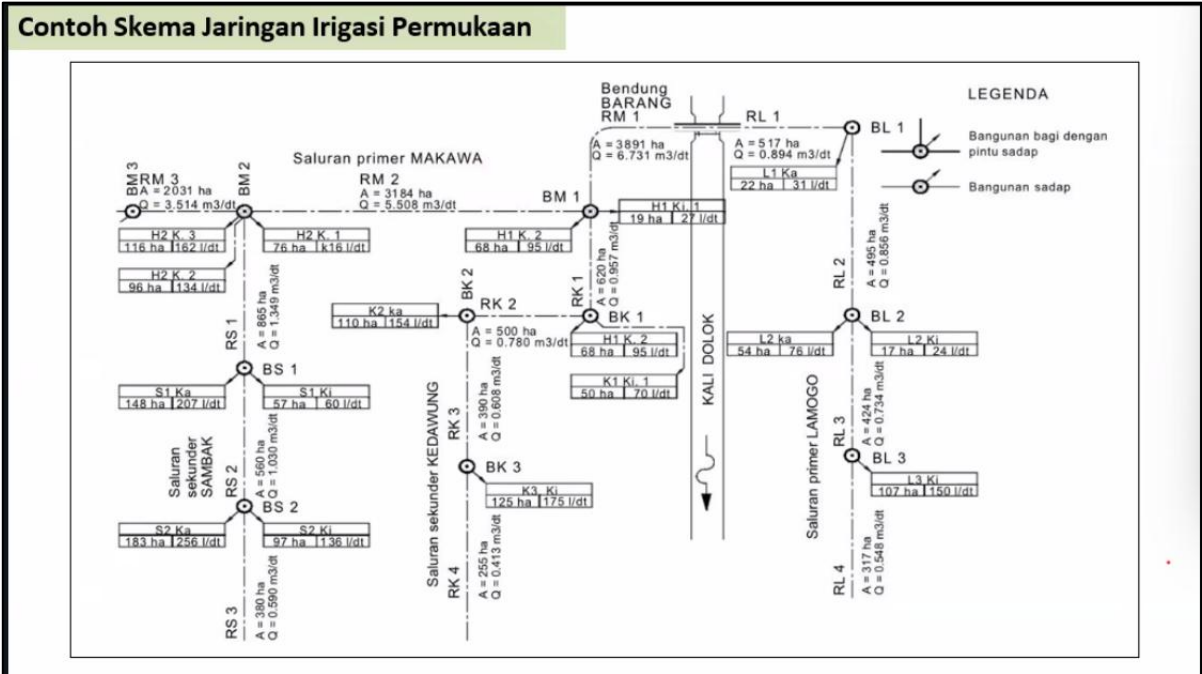
TOTAL DAERAH IRIGASI / DAERAH IRIGASI RAWA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TOTAL DI/ DIR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERMEN 14 TAHUN 2015

Kewenangan	Luasan (Ha)											
	Daerah Irigasi				Daerah Irigasi Rawa				Total			
	Luas Permen 14	Luas Baku	Luas Potensial	Luas Fungsional	Luas Permen 14	Luas Baku	Potensial	Luas Fungsional	Luas Permen 14	Luas Baku	Luas Potensial	Luas Fungsional
Pusat					57,513	85,856.68	78,286.63	21,354.30	57,513	85,856.68	78,286.63	21,354.30
Provinsi	6,765				54,520	82,251	72,254	18,612	61,285	82,250.70	72,254.43	18,611.52
Kabupaten/Kota	51,484	13,649	10,622	8,609	55,109	133,527	122,261	37,700	106,593	147,175.36	132,883.50	46,308.94
TOTAL	58,249	13,649	10,622	8,609	167,142	301,634	272,802	77,666	225,391	315,283	283,425	86,275

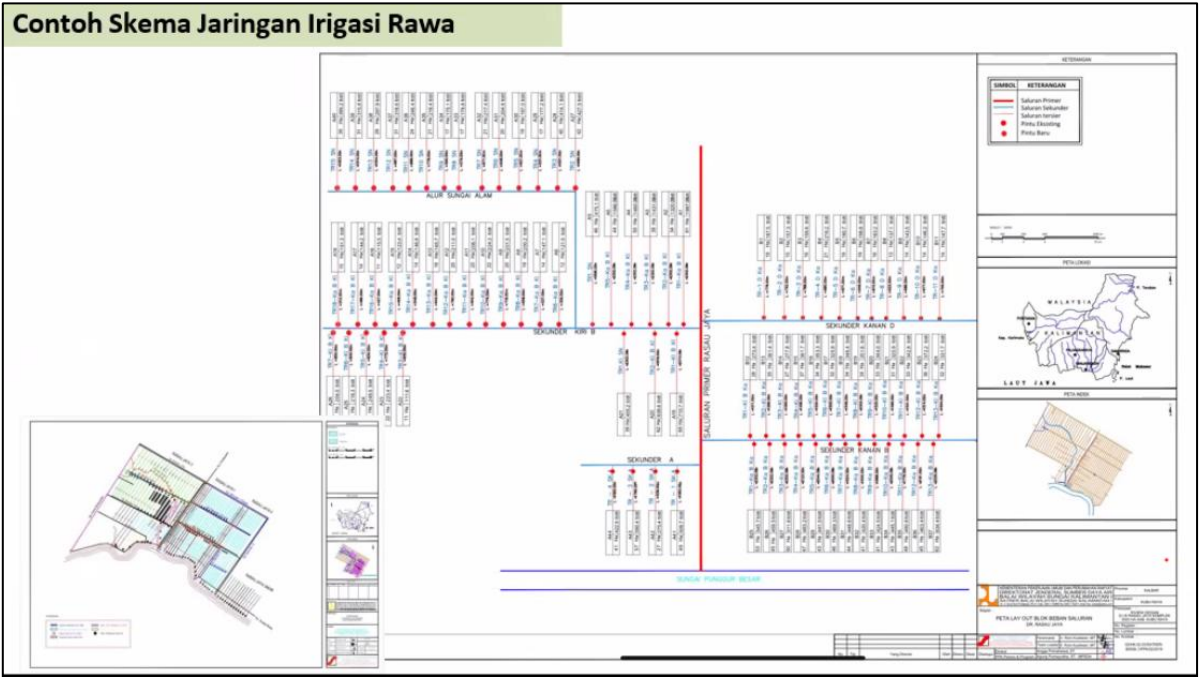
Ada 14 daerah lahan irigasi. Terkait alih fungsi lahan, Untuk kewenangan provinsi, dari kadis PU provinsi yang menangani daerah irigasi. Untuk provinsi ada daerah irigasi rawa, dibawah 3.000 daerah irigasi permukaan, 6.700 totalnya. Kewenangan daerah totalnya 54.000, hanya 25% yang terlihat sawahnya, penyebabnya sudah ada sawahnya tapi belum ada jaringan. Total irigasi permukaan 51.400 ha, rawa lahan gambut 55.000 ha. Untuk menaikkan IP punya potensi besar di daerah irigasi lahan gambut. Daerah irigasi dan rawa di Kalimantan Barat, di Permen luas potensial 283.425, luas fungsional 86.275. Panen padi 3 ton/ha, 86.000 belum mecukupi masih 27%, optimalnya adalah IP 1,2 sudah aman.

Contoh skema Jaringan Irigasi Permukaan



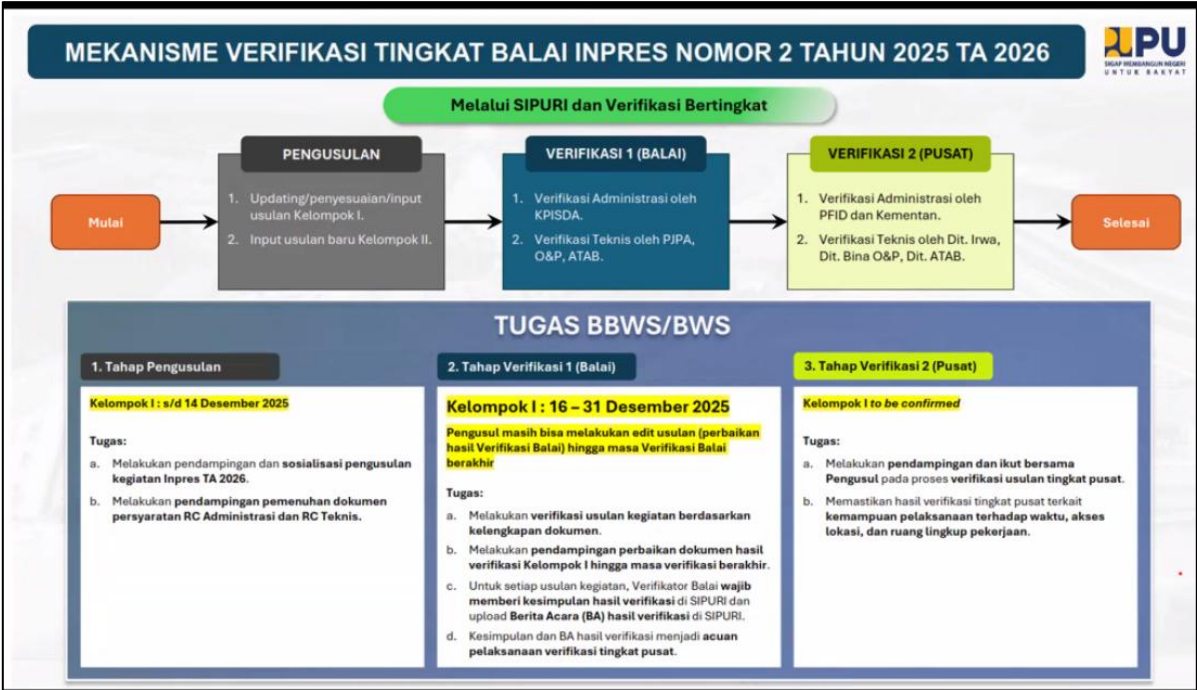
Jika mau IP diatas 2, maka jaringan harus teknis. Harus ada sumber air, bendungan pembangun pengatur dan pengukur untuk memasukkan kebutuhan air pada saat musim tertentu. Pembagian golongan harus ada bangunan bagi saluran primer, sekunder. Bangunan dari sekunder ke tersier. Untuk tersier mendapatkan dana sedikit sekali karena kurangnya kesiapan.

Contoh skema jaringan irigasi rawa



Untuk irigasi rawa, sungai utama, saluran tersier yang kecil. Terkait sawah, jika sudah masuk daerah irigasi kami. Harapannya 20,000 ha bisa nyambung ke antara jaringan utama, tersier dan cetak sawahnya. Untuk jaringan utama, primer, sekunder dikerjakan oleh PU, dan tersier dikerjakan oleh Kementan dan Dinas Pertanian.

Mekanisme Verifikasi Tingkat Balai Inpres No 2 Tahun 2025 TA 2026

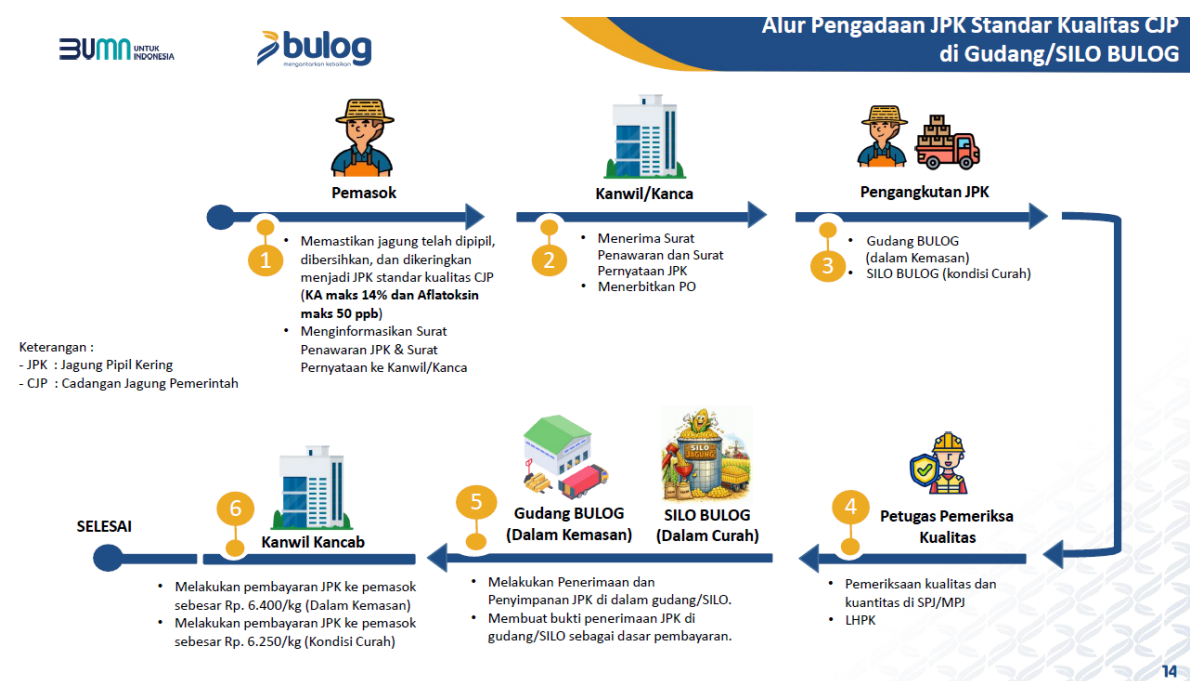
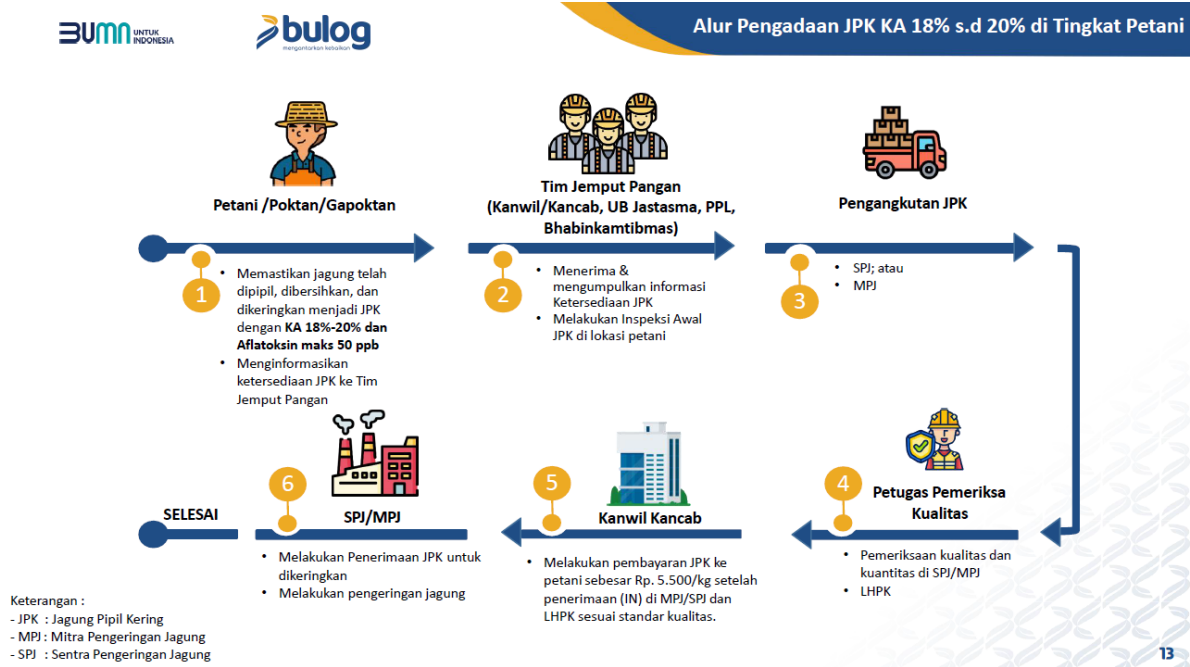


Untuk tersier harus disiapkan Readiness Criteria (RC) nya. Dokumen administrasi dan dokumen teknis. Prosesnya dilakukan verifikasi adminitrasi dan teknis. Untuk 2025 capaian 552 km di saluran rawa.

3. Pimpinan Perum BULOG Provinsi Kalimantan Barat (Serap gabah dan jagung, syarat dan target di Kalimantan Barat) (Rasiwan)

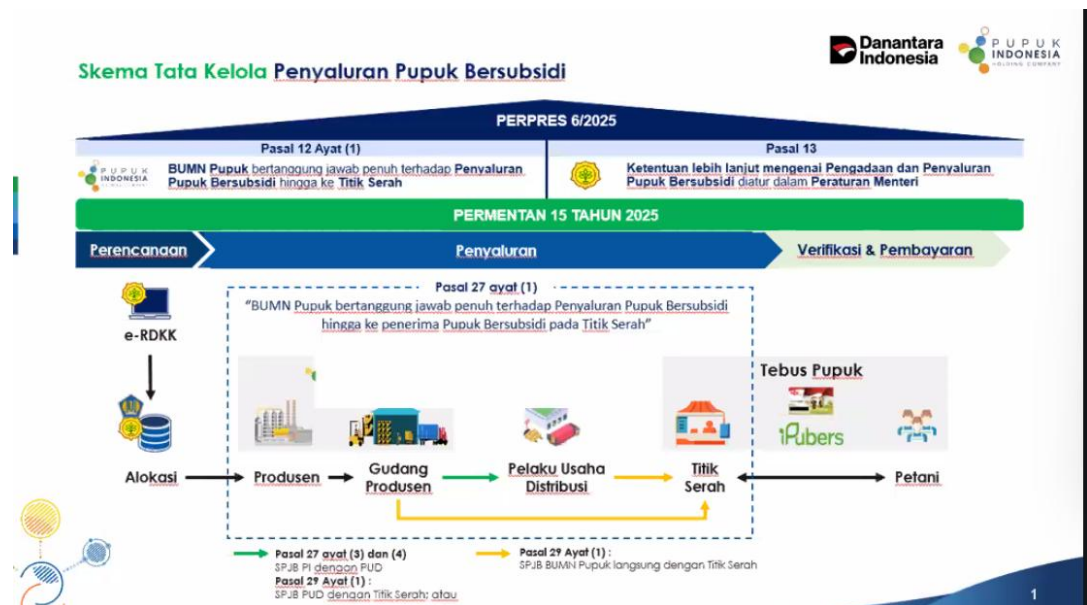
Untuk target kerja bulog sebagai BUMN untuk mengelola cadangan pemerintah, gabah beras dan jagung, itu sangat membutuhkan seluruh dukungan stakeholder. Target kerja bulog tahun 2025 setara 3900 ton itu bisa terlampaui, ini menunjukkan kinerja teman – teman di hulu. Produksi benar adanya, dibuktikan dengan seraoan kami melampoau target. Di Tahun 2026 target naik menjadi 4jt ton, untuk Bulog Kalbar menjadi 5100 ton setara beras. Kolaborasi harus terwujud dari terstruktur dari pusat sampai ke desa dan tinggal mematangkan lagi bagian teknis. Dengan program Jemput Pangan. Persiapan serap jagung untuk memberikan pakan ternak agar harga telur dan ayam tidak naik saat bulan Ramadhan. Untuk minyak goreng ada stock dari DMO sebanyak 35% dan sesuai HET. PPL akan menjadi tim jemput pangan agar HPP GKP tingkat petani sebesar Rp. 6.500/kg berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025. Penyerapan beras medium dengan harga Rp. 12.000/kg di Gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh 95%, kadar air 14%, butir patah 25% dan butir menir 2%. Kalbar no 3 selindo untuk presentase penyerapan setara berasnya. Dimohon untuk Bu Kadis memberitahu kapan puncak panen di Kalbar agar Bulog dapat bersiap. Perencanaan tanam dari awal sampai akhir tahun, sehingga Bulog bisa merencanakan titik – titik mana yang panen agar Bulog dapat langsung menjemput hasil panen tersebut. Untuk serap jagung dari tahun 2025 5.000 ton menjadi 16.000 ton tahun 2026. Untuk harganya yaitu jagung pipilan kering di petani 5.500/kg dan jagung pipilan kering di Gudang Bulog yaitu 6.400/kg.

Alur pengadaan JPK:



No. 081328610872 (Pak Rasiwan)

4. Direktur PIHC Kalimantan Barat (Ketersediaan pupuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan di Kalimantan Barat) (diwakili oleh Pak Moh. Husni)



Kami bertanggungjawab setelah diberi alokasi yang telah dipercayakan kepada kami, dari produsen, gudang produsen, pelaku usaha distribusi, titik serah bisa terakomodir. Jumlah wilayah kerja PT Pupuk Indonesia menaungi distribusi ada 3 pelaku usaha distribusi di 14 Kab/kota di Kalbar.

Jumlah wilayah Pupuk Indonesia menaungi:

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	
	PUD	PPTS
Kab. Bengkayang	3	30
Kab. Kapuas Hulu	2	7
Kab. Kayong Utara	1	4
Kab. Ketapang	1	20
Kab. Kubu Raya	2	13
Kab. Landak	4	49
Kab. Melawi	3	11
Kab. Mempawah	2	19
Kab. Sambas	3	50
Kab. Sanggau	5	30
Kab. Sekadau	2	7
Kab. Sintang	3	13
Kota Pontianak	1	1
Kota Singkawang	1	4
TOTAL	33	258

Total PPTS ada 258.

Ketersediaan stok pupuk bersubsidi:



**Stok Gudang Penyangga
PT Pupuk Indonesia**

Urea : 6.020 Ton
NPK : 8.848 Ton
Organik : 928 Ton



**Stok Gudang
Pelaku Usaha Distribusi**

Urea : 131 Ton
NPK : 190 Ton
Organik : 19 Ton



**Stok Gudang
Penerima Pada Titik Serah**

Urea : 2.277 Ton
NPK : 4.370 Ton
Organik : 318 Ton

TOTAL

Urea : 8.428 Ton
NPK : 13.408 Ton
Organik : 1.265 Ton





5

Realisasi Penebusan PUD

No	Kabupaten	UREA			NPK			Organik		
		Alokasi	Real s.d Februari	%	Alokasi	Real s.d Februari	%	Alokasi	Real s.d Februari	%
1	Kab. Bengkayang	7.933	957	12%	15.000	1.982	13%	121	29	24%
2	Kab. Kapuas Hulu	240	-	0%	400	-	0%	13		0%
3	Kab. Kayong Utara	750	59	8%	1.300	87	7%	200		0%
4	Kab. Ketapang	3.900	409	10%	11.000	1.118	10%	670		0%
5	Kab. Kubu Raya	1.490	103	7%	3.000	235	8%	100	8	8%
6	Kab. Landak	16.600	1.703	10%	27.000	5.306	20%	11.000	227	2%
7	Kab. Melawi	1.940	317	16%	4.392	931	21%	1.600	40	3%
8	Kab. Mempawah	1.700	240	14%	2.500	506	20%	-		#DIV/0!
9	Kab. Sambas	11.600	1.776	15%	22.000	3.720	17%	3.921	154	4%
10	Kab. Sanggau	6.000	512	9%	13.000	1.335	10%	1.250	66	5%
11	Kab. Sekadau	800	8	1%	2.500	8	0%	32		0%
12	Kab. Sintang	1.400	372	27%	4.000	994	25%	310	20	6%
13	Kota Pontianak	5	-	0%	16	-	0%	-		#DIV/0!
14	Kota Singkawang	495	112	23%	1.200	219	18%	-		#DIV/0!
TOTAL		54.853	6.568	12%	107.308	16.439	15%	19.217	544	3%

Gambaran realisasi penebusan PUD, pupuk yang sudah dibeli belum pupuk bersubsidi. Secara target masih kurang, dimana data diatas masih berjalan sampai hari ini. Namun belum disalurkan secara riil ke PPTS. Alokasi sekitar 54.853 ton, untuk 6.568 ton yang sudah direalisasikan.

Realisasi Penyaluran

No	Kabupaten	UREA			NPK			Organik		
		Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	Kab. Bengkayang	12.171	416	3%	15.550	884	6%	-	-	0%
2	Kab. Kapuas Hulu	187	0	0%	310	0	0%	-	-	0%
3	Kab. Kayong Utara	850	11	1%	1.377	8	1%	-	-	0%
4	Kab. Ketapang	4.745	275	6%	12.204	797	7%	1	-	0%
5	Kab. Kubu Raya	1.800	53	3%	2.945	88	3%	1	-	0%
6	Kab. Landak	16.022	958	6%	22.912	2.576	11%	15	3	20%
7	Kab. Melawi	1.200	98	8%	3.110	331	11%	28	-	0%
8	Kab. Mempawah	1.827	143	8%	2.650	251	9%	-	-	0%
9	Kab. Sambas	11.671	795	7%	21.896	1.439	7%	42	1	2%
10	Kab. Sanggau	6.570	89	1%	14.092	270	2%	123	21	17%
11	Kab. Sekadau	927	4	0%	2.959	4	0%	-	-	0%
12	Kab. Sintang	1.745	190	11%	4.523	508	11%	-	2	0%
13	Kota Pontianak	4	0	0%	12	0	0%	-	-	0%
14	Kota Singkawang	567	82	14%	1.000	169	17%	2	-	0%
	TOTAL	60.286	3.114	5%	105.540	7.324	7%	212	27	13%

Untuk pupuk bersubsidi pada bulan Januari 2026, Dimana realisasi penyaluran alokasi Urea alokasi 60.286 ton, realisasi Urea 3.114 ton sudah 5% teralisasinya, NPK 7.324 ton, dan pupuk organik 27 ton.

5. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu (*Mekanisme dan Strategi Pembentukan Brigade Pangan Cetak Sawah di Kalimantan Barat*) (Dr. Ir. Ugik Romadi, S.ST., M.Si.)

Brigade Pangan (BP) yang ada di Kalimantan Barat, beberapa regulasi menjadi pedoman mulai dari kepmen 166 yang saat ini dipedomani. Terakitf dengan BP di Kalimantan Barat yang sudah terbentuk OPLAH 2024, OPLAH 2025 dan CSR itu di Kalimantan Barat untuk OPLAH 2024 terbentuk target 196 ha. Di OPLAH 2025 targetnya 114 ha. Di CSR ada 28 ha. CSR dari 4.000 ha hanya terbentuk 2100 ha. Realisasi BP Kalimantan Barat, BP di OPLAH 2024 terbetuk 196 ha, realisasi 204, di OPLAH 2025 target 148 terbentuk 114, untuk CSR terbentuk 14. BP 2025 148, terbentuk 114. Untuk CSR terbentuk hanya 56%. Ada 14 BP, sebagian sudah menerima alsintan. Target BP CSR tahun 2026 ada 38, target CSR 2026 ada 7.100 ha. Kab. Mempawah tambah 3 BP, Sanggau tidak ada, Landak 3 BP, Sekadau 5 BP, Kubu Raya 3 BP, Bengkayang 2 BP, Ketapang 5 BP, Sintang 3 BP, Sambas 3 BP, Kapuas Hulu 4 BP, Melawi 3 BP, Kayong Utara 3 BP, Kota Singkawang 1 BP, Kota Pontianak tidak ada di tahun 2026.

Kapasitas kerja alsintan setelah memperoleh alat tersebut maka kita yang balik dikerja terkait kinerja Alsintan. Ketika sudah memperoleh alat yang merupakan bagian Alsintan itu maka melaporkan kinerja Alsintan tersebut. Minimal 1 pelaporan di kegiatan CSR tersebut. Unutk OPLAH 2024 sekitar 432 ha, OPLAH 112 ha, CSR 55 ha dan Februari 2026 ini OPLAH 2024 berada pada rapot merah 48-50%, OPLAH 2025 bisa hijau. Tindak lanjut bisa segera dikoordinasikan dengan dinas agar Alsintan bisa segera didistribusikan dan segera dioperasikan.

DISKUSI

Pertanyaan:

1. Bu Astri – BRMP Kalbar

- Pertanyaan pertama untuk pimpinan Bulog Kalbar, untuk CP masing – masing kabupaten untuk Jemput Pangan?
- Pertanyaan kedua Alsintan untuk BP, di Mempawah ada paket Alsintan tidak menerima seluruh Paket tersebut, apakah BP yang tidak mendapat paket alsintan di 2024 dan 2025 apakah harus mengusulkan kembali atau bagaimana?

2. Bu Anis – Dinas Pertanian, Ketahanan pangan, dan Perikanan Singkawang

- Pertanyaan pertama untuk BWSK, di Singkawang banyak pintu air yang dibangun oleh PUPR dan banyak yang rusak dan keluhan untuk langsung diperbaiki, namun memang anggaran terbatas jadi tidak bisa dilakukan. Terkait 2025 JIAR (Jaringan Irigasi Air Tanah) ada beberapa titik ada yg sudah selesai dan dalam proses. Tetapi saat disedot (kedalaman 105 m) dan dicicipi ternyata rasanya agak asin, sehingga akan dilakukan uji lab kadar keasinan. Jika hasilnya asin apa yang harus kami lakukan? Apakah mengubah jenis varietas?
- Pertanyaan kedua, untuk cetak sawah di 2026 memang kami ada 200 Ha di Kota Singkawang, mencari lahan sulit hanya mendapat 40 ha saja, memang kriteria dari cetak sawah (Juknis 2025) yaitu lokasi cetak sawah tidak berada di LBS, tadi saya mendengar ada aplikasi, boleh disampaikan kepada kami apakah lokasi tersebut masuk LBS atau tidak?
- Pertanyaan ketiga, untuk BBPP Batu 2025 BP harusnya 3, kami berharap PP BP, untuk cetak sawah atau bagaimana?

3. Pak Supriadi Kabid PSP – Landak

- Pertanyaan pertama, terkait tindak lanjut kegiatan cetak sawah tahun 2025 bahwa Landak mendapat alokasi lagi seperti bangunan konservasi air dan lain-lain, apa kegiatan - kegiatan ini bisa diterapkan di cetak sawah di tahun 2026?
- Pertanyaan kedua, Berdasarkan 2025 tim SID harus memastikan lahan tersebut clear and clean, dengan harapan lahan sawah baru akan meningkatkan produksi padi kita
- Pertanyaan ketiga, BWS kita tidak mendapatkan kegiatan PITER, operasionalnya bagaimana?
Jawaban: Kita usulkan matangkan, untuk sekunder dan tersier dari dinas. Kami coba identifikasi lagi.

4. Erwan Kabid PSP Bengkayang

- Program Cetak Sawah yang sudah dibangun dari pihak BWS maupun dari Kementerian untuk memprioritaskan lahan cetak sawah yang sudah di bangun, agar irigasinya terbangun. Jika tidak ada sumber air, cetak sawah yang telah dibangun akan menjadi hutan kembali.
- Usulan cetak sawah di kota 450 Ha, sekarang baru diusulkan 230 Ha. Dari PPL yang mengerti potensi – potensi lahannya masing – masing. Karena PPL sekarang bukan dibawah dinas sehingga BRMP bagaimana tindak lanjut bagi PPL tidak mau mengusulkan program – program pemerintah karena takut sibuk dan laporan. Saya harapkan ada penekanan dari BRMP untuk PPL yang tidak mengikuti program pemerintah, agar merata.

5. Dariyanto – Katimker Sekadau

- Cetak Sawah Rakyat di Sekadau kondisi yaitu tadah hujan, lalu spotnya terpisah – pisah. Untuk CSR 2025 kesanggaupan 200 Ha terdiri dari 7 kecamatan, kasihan dari segi mobilisasi bantuan. 2026 seluas hampir 950 Ha, kami merasa kesulitan dari penyuluh sudah mengajukan CPCL menjadi perhatian bersama terkait mobilisasi dan penyuluh pendamping.

- Untuk dirjen PSP atau Kepala Dinas Provinsi, setiap bulan kami ditarget LTT untuk Sekdau penyaluran pupuk bersubsidi belum bisa di salurkan karena RDKK belum bisa di print out, RDKK bagaimana bisa di printout agar bisa disalurkan ke petani. Karena sekarang sedang tidak ada musim tanam.

6. Pak Apriyadi – Kadis Pertanian Sambas

Pertama terdapat kendala terkait pupuk di lapangan, kedua sinerginya bagaimana proses percepatan, ketiga bantuan BP semua petani untuk bantuan BBM untuk alsintan, sehingga petani agar bisa membeli BBM yang bersubsidi.

Tanggapan/Jawaban:

1. Tanggapan dari Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (Pak M. Tahid):

Air asin sudah kami dapat datanya, akan kami koordinasikan lagi. Jika seandainya tersier, kita akan sama-sama usulkan dan matangkan. Primer dan sekunder dari dinas PU. Kami akan identifikasi lagi.

Pak I Gusti Made:

CSR diluar DIR mengalami sedimentasi, agar bisa lebih tepat sasaran.

Menanggapi Pak I Gusti Made:

Jika sawah itu luas maka bisa masuk DI/DIR, maka bisa diusulkan. Bisa dikoordinasikan dengan dinas PU dan Dinas Pertanian.

2. Tanggapan dari Kepala Bulog Kanwil Kalbar (Pak Rasiwan):

Kontak PJ Kab/Kota Jemput Pangan sebagai berikut:

Pontianak, Kuburaya, mempawah, landak 081218556657 (Mahisa Rangga)

Singawang, Bengkayang, Landak 089693429126 (Ryan)

Sintang, Melawi 081345611177 (khairulzamani)

Sanggau, sekadau 085828838100 (putra)

Ketapang, kayong utara 085849968807 (Risa)

Putussibau 085252403347 (Dery)

3. Tanggapan PJ Brigade Pangan (Pak Ugik):

Terkait paket alsintan 26,6-26,7. Akan kita bantu dorong perolehan alsintannya agar lebih optimal. Pada persyaratan administrasi ada 150 ha, di juknis pembaruan awalnya 200 ha menjadi 150 ha. Tapi memang kondisi di Jawa sangat berbeda, antar kecamatan lebih dari 2-3 jam, selama payung hukum berbunyi seperti itu kita sesuaikan dengan regulasi yang ada. Yang menjadi syarat OPLAH 2025, kurang dari 150%. Di CSR dalam pelaporan ada kategori siap tanam, siap tanam bersyarat dan belum siap tanam (atau tidak siap tanam).

4. Tanggapan dari Tenaga Ahli Menteri (Pak I Gusti Made Subiksa):

Untuk BP, pembentukannya area cetak sawah harus menjadi BP, supaya BP bisa ikut mengawasi proses pencetakan sawah, usernya BP yang akan memanfaatkan lahan tersebut. Terkait dengan salinitas memang sebenarnya sebelum dilakukan pengeboran disitu harusnya sudah ada data cekurangan air tanahnya apakah ada salinitas atau apa. Lalu untuk PJ semuanya melakukan koordinasi mengenai masalah pupuk, benih, koordinasi dengan BWS.

5. Tanggapan dari Tenaga Ahli Menteri (Pak M. Mujiburrohman):

Penyuluh sekarang menjadi tumpuan, yang harus sinergi dengan dinas dan saling dukung. Penyuluh harus proaktif. Serap gabah, serap jagung, serap pupuk, pengairan. Agar saat musim hujan tidak kelebihan dan saat musim kemarau tidak kekeringan. Untuk Alsintan diajukan saja nanti disetujui atau tidak urusan belakang, dijadikan upaya untuk menaikan IP.

Tanggapan tentang RDKK tinggal bagaimana keaktifan dari penyuluh, ada kasus saat turun ke lapangan, petani tidak mau memberi data seperti pajak sebagai dasar luasan untuk dimasukan ke RDKK, jika terjadi seperti itu panggil saja kelompok taninya agar menyerahkan dokumen atau data terkait RDKK. Ada juga jika penginputan itu ditutup karena sekarang dibuka setiap 3 bulan sekali. Lalu

dilaporkan kepada Direktur Pupuk Kementan agar ditindaklanjuti. Sehingga penyuluh lebih aktif lagi berkordinasi.

6. Tanggapan dari Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalbar (Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.):

Koordinasi penyuluh masa transisi, yang masih perlu disusun. Penyuluh di bawah BRMP arahan Pak Menteri, namun penyuluh masih dibawah pusluh secara detail rangkaian kegiatannya tentunya teman – teman penyuluh perlu perjalanan dinas belum bisa karena anggarannya belum di BRMP secara teknis. BRMP Kalbar sudah berkomunikasi intens dan Kelsi dan ketua katimker di kantor BRMP Kalbar dan sering berkomunikasi. Ada teknis di lapangan yang belum diperbaiki maka juknis akan di revisi terkait pupuk dan lain-lain. Akan kami lakukan dengan respon yang cepat dari BRMP dan Penyuluh.

7. Tanggapan dari PJ Swasembada Berkelanjutan Prov. Kalimantan Barat (Dr. Asmarhamsyah, S.P., M.Sc.):

Dinas Kab/Kota dan BWS akan diskusikan termasuk dengan BRMP dengan usulan baru cetak sawah karena potensinya besar. Jangan sampai kita sudah cetak sumber airnya tidak jelas, kita menyasarnya daerah rawa karena ketersediaan airnya sudah ada. Para penyuluh sudah bergabung nanti ada paparan BWS harus mengenalkan DIR kepada para penyuluh. Terkait dengan BRMP, seperti cerak sawah dan irigasi air harus diusulkan oleh penyuluh. Karena penyuluh sekarang memiliki kaki 3. Untuk RDKK akan diberikan no Hp direktur pupuk akan segera tuntas masalah pupuknya.

Untuk menjawab Pak Apriyadi, BRMP sudah mendapatkan 1.000 penyuluh untuk menyelesaikan SK tersebut. Untuk poktan yang mendapatkan BBM di SK an oleh Bupati atau Dinas setempat, sehingga tidak bisa seenaknya. Karena harus ditulis nomor alsintan agar tidak ada temuan kedepannya.

Dokumentasi Kegiatan



NOTULENSI DISKUSI
Capacity Building Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan
Provinsi Kalimantan Barat

(berdasarkan Surat Undangan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor B-25/SR.150/J.6/02/2026
tanggal 25 Februari 2026)

Hari/Tanggal	:	Senin, 02 Maret 2026
Metode Rapat	:	Luring dan Daring melalui Zoom Meeting Room
Meeting ID	:	91770542330 Passcode: 123123
Moderator Diskusi	:	Anjar Suprpto, S.T.P., M.P. (Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat)
Und & Daftar Und	:	<i>Terlampir</i>
Tempat	:	Aula Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Jl. Budi Utomo No. 45, Pontianak Utara, Prov. Kalimantan Barat

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian menggelar *Capacity Building* Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 secara luring dan daring, bertempat di Aula Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat.

Acara ini dihadiri oleh PJ Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat secara daring, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Ketua Kelompok Substansi Penyuluhan Pertanian Kalimantan Barat, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi Penyuluhan Pertanian Kalimantan Barat, Ketua Tim Kerja Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian Kalimantan Barat, Ketua Tim Kerja Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Barat, Penyuluh Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, serta Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Barat.

Sambutan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat (Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.)

Pagi ini akan dilaksanakan *Capacity Building* untuk meningkatkan kapasitas tentang lokasi dan daerah irigasi. Target tahun 2026 sekitar 7.000 hektar dan target bisa meningkat menjadi sekitar 20.000 hektar. Materi ini dapat menjadi dasar untuk pengetahuan dalam rangka mencari/menetapkan CPCL untuk program Swasembada Pangan.

Sambutan PJ Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat (Dr. Asmarhansyah, S.P., M.Sc.)

Capacity Building adalah tinjau lanjut dari agenda sebelumnya yang menerangkan teman-teman penyuluh dan menjawab BRMP tentang bagaimana untuk membina dan mengarahkan agar kegiatan sesuai dengan tujuan. Ada 2 hal terkait *Capacity Building* yang akan dipaparkan yakni Pengenalan Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa di Kalimantan Barat dan Monitoring Lahan Baku Sawah (LBS) Padi dengan Aplikasi Avenza. Dua hal ini penting karena akan menambah pengetahuan maka teman-teman penyuluh diharapkan akan menguasai wilayah kerjanya, berapa luas dan apakah sudah beralih fungsi sehingga setelah menguasai DIR dan LBS, teman-teman akan bisa memantaunya. Dengan bekal itu saya berharap penyuluh bisa menguasai wilayahnya dan hal itu sangat penting termasuk diantaranya mengenai subsidi pupuk. Topik ini sangat penting dengan tujuan kita akan memiliki batas ukurannya dengan begitu akan ada panduan terkait luas lahan mereka. Dengan mengetahui LBS akan bisa diketahui apakah sawah sudah beralih fungsi non padi atau belum dialihkan. Jadi secara umum bisa diketahui DI atau DIR dan LBS-nya sehingga hal tersebut saling terkait. Saya sangat percaya narasumber yang kita undang hari ini sangat ahli dalam memberikan penjelasan dan saat penjelasan nanti jangan disiasiakan sehingga harus dilakukan diskusi 2 arah, jangan 1 arah sehingga akan bermanfaat. Terkait dengan DI dan DIR bisa jadi kedepan ada topik lain yang perlu difasilitasi untuk menjawab tantangan kegiatan.

Paparan Sesi 1

Pengenalan Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa di Kalimantan Barat oleh M. Tahid, S.T., M.P.P.M., selaku Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I.

Acara ini ditunggu-tunggu karena dapat bersinergi untuk jaringan irigasi. Kendala sampai saat ini adalah kendala sinergi program. Semoga dapat berdampak untuk peningkatan LTT. Pengembangan adalah Pembangunan bangunan-bangunan irigasi baru yang dapat digunakan untuk irigasi pertanian.

Dasar hukum terkait kebijakan dan strategi (UUD 1945 Pasal 33, UU No. 17 Tahun 2019, PP No. 20 Tahun 2006) serta tentang teknis (Inpres No. 2 Tahun 2025, Peraturan Menteri PUPR (Pengelolaan & Operasi Jaringan Irigasi, Status & Kriteria Daerah Irigasi, Irigasi Khusus (Rawa, Tambak, Air Tanah), Teknis dan Kelembagaan).

Diharapkan P3A dan Gapoktan digabung agar intervensi program dapat berjalan dengan lancar. Biasanya di garis sempadan di jalur irigasi sudah dibebaskan agar dapat digunakan oleh petani secara optimal. Lahan tadah hujan dan lahan gogo belum termasuk DI (Daerah Irigasi). Di Kalimantan Barat, dana yang digulirkan untuk bidang pertanian (pembuatan DI dan pembuatan P3A) yaitu dengan kisaran 500-600 Milyar.

Prinsip dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi adalah apabila DI terintegrasi dapat berjalan dengan maksimal dan agar menjadi satu kesatuan. Sifatnya partisipatif (top-down), dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Di jaringan utama mengurus tata air makro dikelola oleh PU, sedangkan tata air mikro oleh P3A, GP3A, dan IP3A atau pertanian.

Daerah Irigasi (Permen 30 Tahun 2015) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air. Irigasi yaitu usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Sistem Irigasi ialah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Sedangkan daerah irigasi merupakan kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi yaitu saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Operasi Jaringan Irigasi ialah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi (jaringan tersier). Pemeliharaan Jaringan Irigasi ialah upaya-upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Irigasi teknis meliputi tanaman tertib, suplai pupuk dan benih, serta indeks pertanaman yaitu di atas 2. Irigasi teknis yaitu sistem irigasi dengan bangunan pengambilan permanen yang lengkap dengan lining saluran mayoritas permanen, pengaturan airnya terukur dan efisiensinya tinggi.

Irigasi permukaan kebanyakan dari sungai, danau, dan waduk. Irigasi rawa yaitu pasang surut/lebak. Irigasi air tanah dan irigasi pompa membutuhkan biaya operasional yang tinggi seperti bahan bakar.

Daerah irigasi berdasarkan kewenangan yaitu kewenangan pemerintah pusat (Luas DI > 3000 Ha). Luas baku merupakan luas rencana. Luas potensial bisa dipengaruhi kondisi jaringan (rusak/sebagian belum terbangun) serta merupakan luas yang berpotensi dilayani air sedangkan luas fungsional ialah luas yang benar-benar berfungsi/terlayani.



DI BERDASARKAN KEWENANGAN



Peraturan Menteri PUPR 14/PRT/M/2015 tentang *Kriteria dan Status Daerah Irigasi*

Sambas	Ketapang	Kubu Raya	Bengkayang	Kapas Hulu	Kayong Utara	Pontianak	Landak	Melawi	Sanggau	Sekadau	Sintang	Kota Singkawang
D.I.R. PUSAT	D.I.R. PUSAT	D.I.R. PUSAT	DI Provinsi		DI Provinsi	DI Provinsi	DI Provinsi	DI Provinsi	DI Provinsi	DI Provinsi		DI Kabupaten/Kota
D.I.R. Pemangkat Komplek	D.I.R. Pematang Gadung I	D.I.R. Kerawang Komplek	D.I. Madi		D.I.R. Kamboja	D.I. Dema Sualam	D.I. Dema Sualam	D.I. Kenyikap	D.I. Merowi	D.I. Rawak Hulu		Daerah Irigasi Permukaan
D.I.R. Pimpinan Komplek	D.I.R. Pematang Gadung II	D.I.R. Kubu Komplek	D.I. Sanggau Ledo		D.I.R. Mata-Mata	D.I. Gutok	D.I. Gutok					D.I. Bok Makong
D.I.R. Sarang Bunung Komplek	D.I.R. Sul. Kinjil	D.I.R. Teluk Bayur			D.I.R. Mendawak Linda	D.I. Takong	D.I. Takong					D.I. Lirang
D.I.R. Sebangkau			Daerah Irigasi Rawa		D.I.R. Padu Banjar	D.I. Sembora	D.I. Sembora					D.I. Teluk Karang
D.I.R. Sebau	DI Provinsi	DI Provinsi	D.I.R. Sungai Keran		D.I.R. Siduk	D.I. Benuang	D.I. Benuang					D.I. Kali Asin
D.I.R. Sebusus Komplek	D.I.R. Bagan Lari	D.I.R. Jawi-Kalimas-Betutu			D.I.R. Teluk Batang 1/3	D.I. Pak Bulu	D.I. Pak Bulu					D.I. Pakunam
D.I.R. Selakau Komplek	D.I.R. Kuala Tolak	D.I.R. Kapuas Kecil I				D.I. Ngarak	D.I. Ngarak					D.I. Sjangkung
D.I.R. Semelagi Komplek	D.I.R. Negeri Baru	D.I.R. Kapuas Kecil II										D.I. Pasi Pangmilang
	D.I.R. Suka Baru	D.I.R. Olak Olak Kubu										D.I. Lohabang
DI Provinsi	D.I.R. Sungai Awan	D.I.R. Pinang Komplek				Daerah Irigasi Rawa						D.I. Sagatani
D.I.R. Jawali	D.I.R. Tempurukan	D.I.R. Pungkur Selak Kering				D.I.R. Jungkat Komplek						D.I. Talam Pajintan
D.I.R. Lela		D.I.R. Rasau Jaya I, II, III, IV				D.I.R. Penipat Komplek						D.I. Sanggau Kulor
D.I.R. Malek Nibung		D.I.R. Tebang Kacang				D.I.R. Sungai Pinyuh Komplek						D.I. Nyarumkop
D.I.R. Seburung		D.I.R. Teluk Nibung										D.I. Petengahan
D.I.R. Segarau												D.I. Maysiopa
D.I.R. Seranggam Komplek												D.I. Sei. Tangket
D.I.R. Serunai Komplek												D.I. Pasiran
D.I.R. Simpang Empat												D.I. Ho Loknam
D.I.R. Tebas Komplek												D.I. Manggis
D.I.R. Tekarang Komplek												

LINK SOURCE :

https://puprtes-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/hannyadityanta_pu_go_id/IQDqz5Jlg_o1Rrk2yp_3RmjAe4SqOXPEGcDIUm_ZkV0pYc?e=8n5Mhr

Di bagian hululah daerah yang dapat digenjut untuk meningkatkan produktivitas padi.



DI BERDASARKAN KEWENANGAN



Peraturan Menteri PUPR 14/PRT/M/2015 tentang *Kriteria dan Status Daerah Irigasi*

Kewenangan	Luasan (Ha)											
	Daerah Irigasi				Daerah Irigasi Rawa				Total			
	Luas Permen 14	Luas Baku	Luas Potensial	Luas Fungsional	Luas Permen 14	Luas Baku	Luas Potensial	Luas Fungsional	Luas Permen 14	Luas Baku	Luas Potensial	Luas Fungsional
Pusat					57,513	85,856.68	78,286.63	21,354.30	57,513	85,856.68	78,286.63	21,354.30
Provinsi	6,765				54,520	82,251	72,254	18,612	61,285	82,250.70	72,254.43	18,611.52
Kabupaten/Kota	51,484	13,649	10,622	8,609	55,109	133,527	122,261	37,700	106,593	147,175.36	132,883.50	46,308.94
TOTAL	58,249	13,649	10,622	8,609	167,142	301,634	272,802	77,666	225,391	315,283	283,425	86,275

NO	KABUPATEN	KEWENANGAN								TOTAL
		PUSAT		PROVINSI		KABUPATEN				
		DI	DIR	DI	DIR	DI	DIR	DI	DIR	
1	Kab Sambas		8		11		17		85	121
2	Kab Ketapang		3		6		72		10	91
3	Kab Kubu Raya		3		9		7		64	83
4	Kab Bengkayang			2	1		71		6	80
5	Kab Kapuas Hulu						73		1	74
6	Kab Kayong Utara				6		13		21	40
7	Kab Pontianak			7	3				9	19
8	Kab Landak			7			198			205
9	Kab Melawi			1			48			49
10	Kab Sanggau			1			80			81
11	Kab Sekadau			1			64			65
12	Kab Sintang						79			79
13	Kota Singkawang						18			18
	TOTAL	0	14	19	36	740		196		

Tata air makro di tingkat primer dan sekunder di Kementerian PUPR serta tata air mikro yaitu di Kementerian Pertanian.



HIRARKI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN



JARINGAN FISIK



Bendung

Menaikkan muka air sungai dan mengalirkan ke intake



Intake

Mengatur debit masuk saluran



Saluran Primer

Menyalurkan air dari bendung. Kapasitas Debit Paling Besar



Bag Bagi/ Bagi Sadap

Membagi debit ke beberapa saluran sekunder/tersier dan petak sawah



Saluran Pembuang/Drainase

Membuang kelebihan air dari lahan pertanian dan jaringan irigasi agar tidak terjadi genangan



Saluran Tersier

Mengalirkan air dari sal sekunder ke petak sawah. Umumnya dikelola P3A



Bag Bagi/ Bagi Sadap

Membagi debit ke beberapa saluran sekunder/tersier dan petak sawah



Saluran Sekunder

Sal cabang dari primer. Membagi debit ke sal tersier

Untuk cetak sawah, pertimbangannya yaitu hamparan sawah yang akan dialiri termasuk elevasinya. *Intake* ada pintu untuk mengatur, kapan harus *full capacity* dan banjir serta memasuki panen. Ini termasuk irigasi teknis, harus ada pengaturan yang jelas. Skema jaringan diperlukan untuk rencana tanam.

Di lahan rawa ada kandungan gambut, bila terjadi *overdrain* akan mengakibatkan *subsidence* (Irreversible dying). Serta lahan rawa mengandung pirit yang bersifat racun bagi tanaman apabila teroksidasi. Lahan rawa pasang surut terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut. Di Kalimantan Barat lahan rawa pasang surut mulai dari Kabupaten Sambas hingga Kabupaten Kayong Utara. Lahan rawa pasang surut terbagi menjadi 4 kategori antara lain (1) Kategori A: Lahan terluapi air pasang min 4 / 5 kali selama 14 hari siklus pasang purnama, baik musim hujan maupun musim kemarau. (2) Kategori B: Lebih cocok untuk ditanami padi. Lahan dapat diluapi oleh air pasang min 4 / 5 kali selama 14 hari siklus pasang purnama hanya pada musim hujan saja. (3) Kategori C: Lahan rawa yang tidak dapat terluapi air pasang besar sepanjang waktu (atau hanya kadang-kadang saja), dan (4) Kategori D: Merupakan lahan rawa yang cukup tinggi sehingga sama sekali tidak dipengaruhi oleh pasang vertikal air laut atau tidak dapat terjangkau oleh luapan air pasang (lebih menyerupai lahan kering).

Daerah Irigasi Rawa merupakan satu kesatuan lahan rawa yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengelolaan air (saluran, pintu air, tanggul, dan bangunan pengendali lainnya) untuk mengatur tata air sehingga lahan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Filosofi pengelolaan daerah irigasi rawa yaitu fokus pada pengendalian air (*water level management*). Tujuan pengelolaan tata air pada Daerah Irigasi Rawa antara lain: 1) Mengendalikan kelebihan air saat musim hujan/pasang, 2) Menjamin ketersediaan air saat kemarau/surut, 3) Menstabilkan tinggi muka air tanah agar zona perakaran optimal, 4) Mengurangi kemasaman dan toksisitas (Fe, Al) pada tanah rawa tertentu, 5) Mencegah intrusi air asin pada rawa pasang surut dekat pantai. Prinsip tata air pada sistem tata air irigasi rawa: 1) Pengendalian Dua Arah (*Two-Way Flow*) berbeda dengan irigasi biasa yang dominan mengairkan air ke lahan pada rawa. Air bisa masuk saat diperlukan, serta air dapat pula dibuang saat berlebih. 2) Pengaturan Tinggi Muka Air. Target muka air disesuaikan fase pertumbuhan tanaman: fase awal yaitu air dangkal, fase vegetative yaitu genangan terkendali, fase generative yaitu pengurangan genangan, serta panen yaitu pengeringan bertahap. Pada rawa sulfat masam, muka air tidak boleh terlalu turun agar lapisan pirit tidak teroksidasi.

System Planning (Perencanaan Sistem) pada pertanian atau irigasi adalah proses perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh komponen sistem mulai dari sumber daya air, jaringan irigasi, lahan, pola tanam, kelembagaan, hingga operasi dan pemeliharaan agar tujuan produksi dan keberlanjutan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kelemahan di DIR yaitu tidak adanya tanggul.

Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan dari tahapan perencanaan umum dan kelayakan proyek, AMDAL, pembebasan lahan, desain, pembangunan, serah terima operasi dan pemeliharaan untuk pemanfaatan sistem irigasi dari berbagai stakeholder dan petani secara partisipatif. Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang berdasarkan prinsip: sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat; kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; serta bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Terkait dengan sinergi program, salah satunya ialah Cetak Sawah yaitu luas fungsional dan luas baku dapat berfokus disitu. Untuk LTT dan Pola Tanam, benahi pola tanam DI yang sudah existing. Sama-sama menyusun pola tanam yaitu DI dan non-DI (hanya 1 kali). Lalu operasi dan pemeliharaan, untuk di jaringan primer akan mendata kebutuhan infrastruktur irigasi. Diharapkan tingkatan tersier (pertanian) sama-sama mendata.

SESI DISKUSI

Pertanyaan

1. Pertanyaan Sanusi, SST.
Pemahaman tentang Pemeliharaan. Saluran utama dan sekunder yaitu wewenang PUPR. Yang menjadi masalah yaitu tersier. Untuk Kementan, tidak ada anggota mengenai pemeliharaan saluran irigasi. Wewenang kabupaten/provinsi yaitu PU atau Pemda? Petak air mikro dianggap tata air mikro?
2. Pertanyaan Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
Hari ini kita menerima informasi mengenai DI atau DIR tentang Rawa Pasang Surut. Apakah kita masih boleh dan bisa menentukan pola tanam untuk dijadikan SK? Dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, petani dapat menanam tanaman selain padi, seperti palawija dan hortikultura. Luas baku sawah dari ATR BPN (2019) menetapkan LBS di Kalimantan Barat yaitu 242,972 ha. Daerah Irigasi Rawa agak berbeda dengan daerah irigasi teknis, di Kubu Raya tipe Luapan A atau B. Untuk di Sambas yaitu tipe luapan C atau D. Fasilitasnya banyak yang rusak sehingga di daerah pesisir banyak interupsi air asin. Penyuluh dapat merekap dan menyusun terkait usulan CPCL.
3. Pertanyaan Bapak Seriyanto dari Kabupaten Ketapang
Kecamatan memiliki 5 desa di daerah pesisir. Dari BWSK telah melaksanakan pembersihan saluran, namun kegiatan tersebut masih kurang, terutama pada tanggul yang terdampak banjir air asin sehingga menyebabkan gagal tanam. Beberapa desa banyak yang memerlukan perbaikan tanggul, untuk mekanisme rehabilitasi tanggul bagaimana?
4. Pertanyaan Agus Subekti, S.P., M.P.
Dalam rangka mendukung kegiatan, BWS sebagai pendukung dari kegiatan-kegiatan Kementan yang sudah ada khususnya OPLAH dan Cetak Sawah. Untuk kegiatan OPLAH dan Cetak Sawah, prioritas yang dapat dilakukan memaksimalkan lahan-lahan terkendala sulit air atau ada genangan air yang tidak bisa diselesaikan dapat diusulkan. Dalam melakukan pengusulan, mekanisme pengusulan lewat SIPURI, seperti apa mekanisme penyampaian CPCL?

Tanggapan

1. Tanggapan untuk pertanyaan Sanusi, SST.
Memang tersier wilayahnya petani, mereka melakukan sendiri. Maka oleh karena itu, kewenangan dari Dinas Pertanian hanya mungkin pada saat pelaksanaan petani akan diberdayakan apakah sukarela atau digaji. Hal itu berlaku juga untuk OP-nya dari Kementan dikasih ke Dinas Pertanian sehingga menyambung. Untuk Dinas PU tidak sampai tersier. Karena tersier adalah wilayah Dinas Pertanian.
2. Tanggapan untuk pertanyaan Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
Kebanyakan mesin irigasi sudah didorong untuk irigasi padi. Sejak tahun 2017 sudah diperbolehkan pengajuan mesin irigasi secara bebas. Sebagai contoh dilakukan kombinasi kolam ikan, padi dan tebu, hal itu diperbolehkan yang terpenting air ada ketercukupannya harus balancing. Pada saat diskusi semua harus terlibat pada saat sistem dan jaringan irigasi sudah jalan. Saat ini Komir sendiri tidak jalan sehingga sistemnya kurang terstandar dan harapannya pertanian bisa difasilitasi. Irigasi bisa dikombinasikan bebas. kenapa tidak ditetapkan pola tanam karena sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan luasan baku sudah dikoordinasikan dengan BPN agar lebih valid. Daripada tidak dikerjakan pusat maka dikirim ke provinsi. Ketika penyuluh melakukan verifikasi data maka akan bagus untuk dukungan data. Mohon saat dilakukan penggalan potensi-potensi oleh PPL mohon untuk BWS diundang untuk melakukan validasi juga.
3. Tanggapan untuk pertanyaan Bapak Seriyanto dari Kabupaten Ketapang

Kedepannya akan dilakukan survei dan *smart* identifikasi. Rata-rata fasilitas pintu air banyak yang rusak sehingga perlu diidentifikasi dan dilakukan perbaikan. Rawa-rawa kita di beberapa tempat banyak yang diusulkan untuk dibendung dan dibuat irigasi permukaan. Ini yang sedang dicari formulanya untuk dibuat bendung.

4. Tanggapan untuk pertanyaan Agus Subekti, S.P., M.P.
Usulan SIPURI bisa diusulkan saat sosialisasi. SIPURI memang pelakunya Dinas PU dan untuk saluran tersier dilakukan oleh Dinas Pertanian semoga ada SK Bupati agar fleksibel bisa dilakukan oleh keduanya. Untuk SIPURI dananya ada di PU sedangkan penanganan tersier oleh Dinas Pertanian.

Paparan Sesi 2

Monitoring Lahan Baku Sawah (LBS) Padi dengan Aplikasi Avenza oleh Khairul Anam, S.P., M.Si perwakilan dari Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian.

Avenza adalah aplikasi peta offline berbasis GPS yang dapat digunakan di smartphone. Dengan aplikasi Avenza kita bisa tahu dan memantau terkait dengan lahan baku sawah (LBS). Aplikasi Avenza dibutuhkan khususnya dalam kegiatan swasembada pangan berkelanjutan karena sebagian lokasi petani belum masuk LBS, dibutuhkan data luas tanam yang valid dan diperlukan alat praktis untuk mengecek lokasi di lapangan. LBS adalah lahan sawah yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN yang digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan dalam bidang pertanian. Sebagai acuan perencanaan tanam dan produksi, program bantuan tepat sasaran dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penyuluh lapangan mengecek data LBS saat meninjau lokasi LTT, mensinkronkan dengan pelaporan LTT dan melakukan pemutakhiran data spasial.

LUAS LAHAN BAKU SAWAH (LBS) DI KALIMANTAN BARAT					
No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jenis Daerah Irigasi (DI)		Non DI (ha)	Jumlah (ha)
		DI Permukaan (ha)	DI rawa (ha)		
	Kalimantan Barat	22.892	71.052	106.554	200.499
1	Bengkayang	2.019	373	6.296	8.688
2	Kapuas Hulu	718	452	5.332	6.501
3	Kayong Utara	1.571	3.951	3.492	9.013
4	Ketapang	1.110	12.529	7.117	20.756
5	Kota Pontianak	-	40	143	184
6	Kota Singkawang	838	1.188	527	2.553
7	Kubu Raya	433	13.681	14.730	28.845
8	Landak	8.212	-	19.005	27.218
9	Melawi	364	-	1.972	2.335
10	Mempawah	2.062	3.318	5.617	10.996
11	Sambas	211	35.520	9.313	45.044
12	Sanggau	3.240	-	18.406	21.646
13	Sekadau	854	-	6.204	7.057
14	Sintang	1.262	-	8.401	9.663

Berdasarkan data BPN tahun 2024.



**TARGET KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(Kepmentan 166/Kpts./PW.020/M/02/2026)**

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	LBS (ha)	LTT Reguler (Ha)	Cetak Sawah (Ha)	BP Cetak Sawah	LTT Padi Gogo (Ha)	Luas Panen Padi (Ha)	Serap Gabah Bulog (Ton)	Serap Jagung Bulog (Ton)	Serap Pupuk Subsidi (Ton)
	Kalimantan Barat	200.499	235.986	7.100	36	40.473	190.598	5.101	16.400	181.378
1	Sambas	45.044	56.781	550	3	1.491	47.598			37.521
2	Bengkayang	8.688	13.208	450	2	2.174	10.350			23.054
3	Landak	27.218	80.717	500	3	11.408	65.820			54.600
4	Mempawah	10.996	11.024	500	3	220	8.997			4.200
5	Sanggau	21.646	17.480	-	-	8.343	13.185			20.250
6	Ketapang	20.756	4.366	1.000	5	1.034	3.412			15.570
7	Sintang	9.663	6.776	500	3	1.500	5.072			5.710
8	Kapuas Hulu	6.501	10.216	850	4	3.701	8.390			653
9	Sekadau	7.057	4.875	950	5	1.291	3.805			3.332
10	Melawi	2.335	2.894	500	3	9.300	2.163			7.932
11	Kayong Utara	9.013	7.000	500	3	-	5.451			2.250
12	Kubu Raya	28.845	13.379	600	3	11	13.694			4.590
13	Kota Pontianak	184	187	-	-	-	160			21
14	Kota Singkawang	2.553	3.083	200	1	-	2.501			1.695

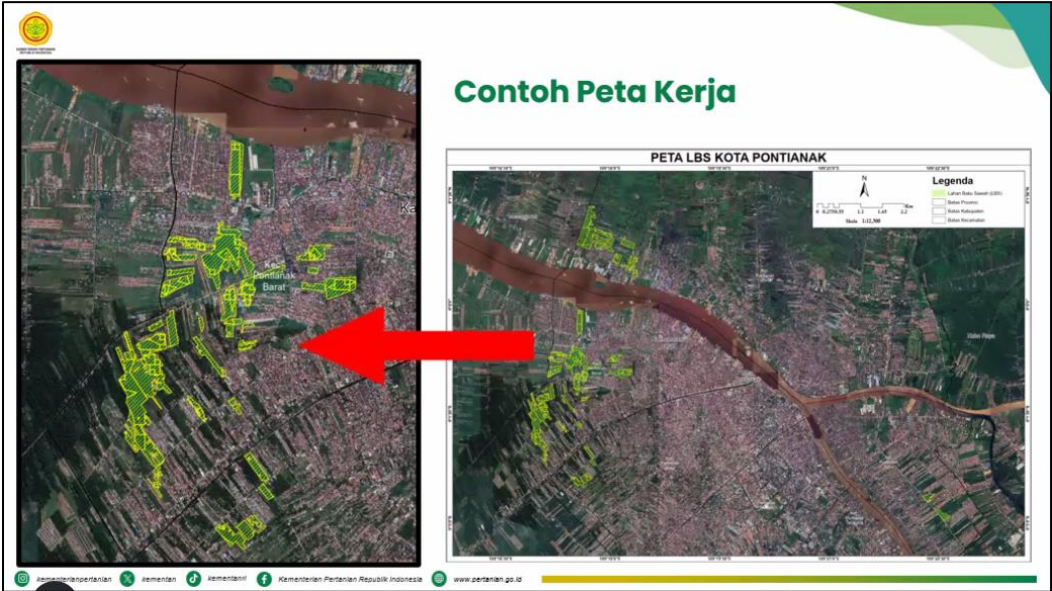
Berdasarkan Kepmentan tahun 2026.

Berdasarkan kedua data diatas terdapat perbedaaan sehingga perlu adanya pemutakhiran data agar diperoleh data yang sesuai.

Berikut merupakan alur monitoring Luas Tanam pada LBS dengan aplikasi Avenza maps. Pertama siapkan peta kerja (peta LBS per wilayah pengamatan) kemudian buka aplikasi Avenza Maps, Aktifkan GPS pada Hp kemudian datanggi lokasi tanam, Cek posisi terhadap polygon LBS dan disimpan lalu simpan titik lokasi/area pertanaman. Avenza pada dasarnya gratis namun apabila menginginkan fitur yang lebih lengkap maka membayar dengan tarif sekitar 2 juta per tahun.

Keunggulan avenza :

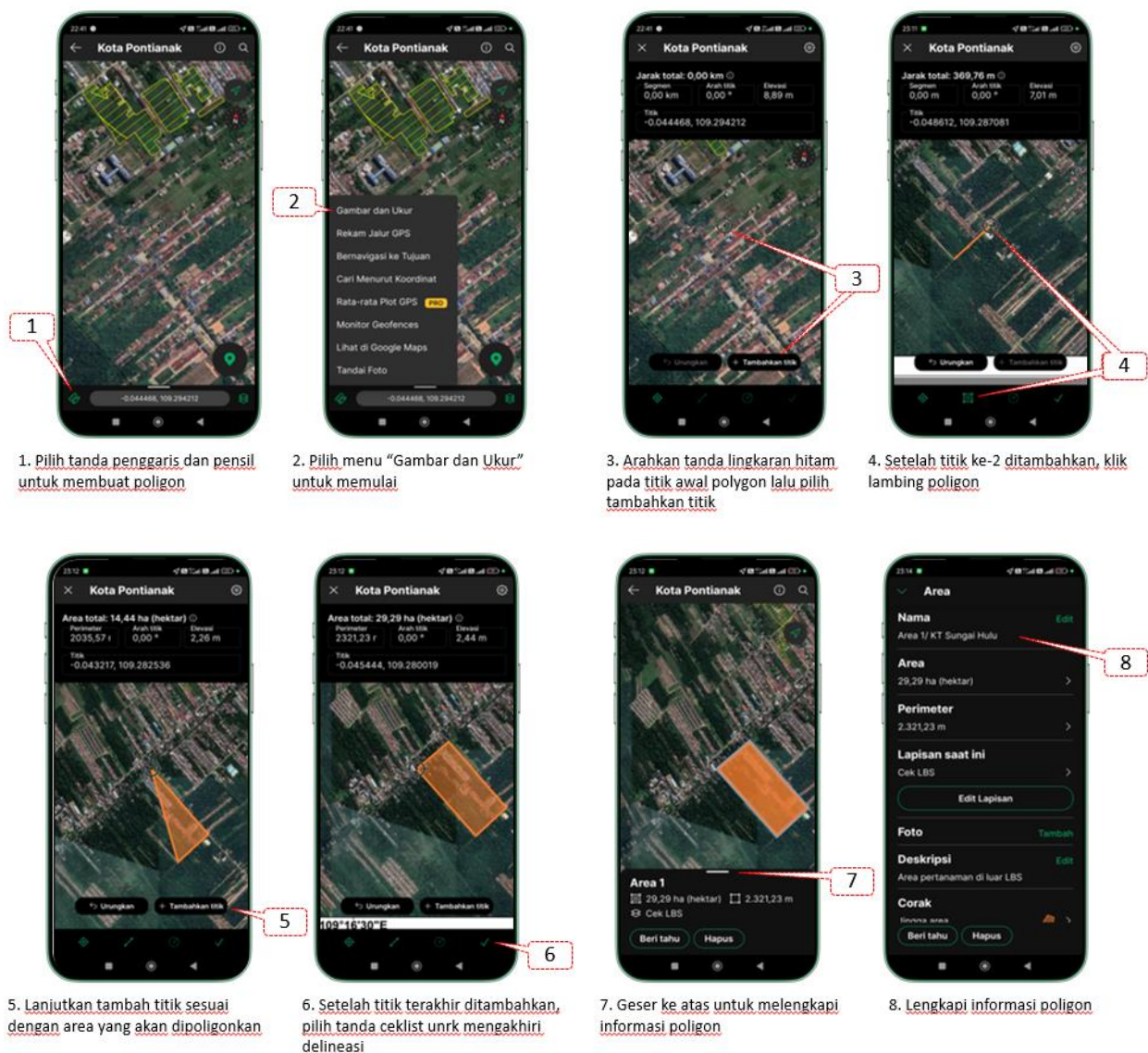
- Menampilkan peta secara offline
- Menunjukkan posisi GPS csecara real time
- Mengecek lokasi tanam terhadap polygon LBS
- Titik dan polygon dapat disimpan sebagai bukti dalam berbagai format seperti .kml, .kmz, .gdb

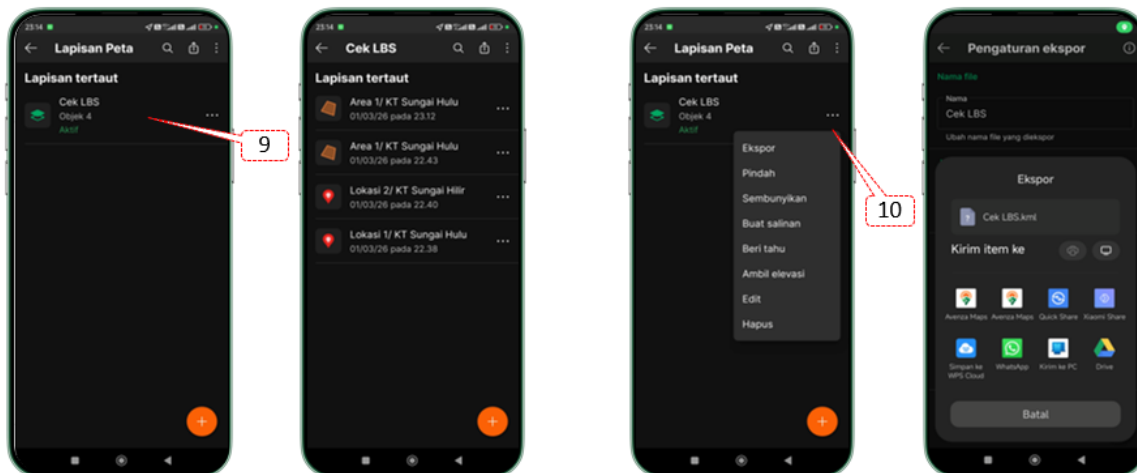


Saat ini Avenza sudah bisa membuat polygon ondesk. Berbeda dengan dahulu harus dilakukan tracking terlebih dahulu. Untuk pengaktifannya harus install aplikasi Avenza dahulu di Android maupun IPhone. Adapun caranya antara lain :

1. Buka aplikasi Avenza
2. Login dengan akun google yang sudah terdaftar di HP (sering digunakan) dan apabila meminta izin akses pilih setuju saja.
3. Saat sudah masuk menu perpustakaan pilih tanda plus (+).
4. Kemudian pilih peta kerja yang sesuai dengan lokasi yang akan disurvei. Peta kerja yang digunakan adalah peta kerja kabupaten yang sudah dishare sebelumnya.
5. Setelah peta kerja terupload lalu pilih peta kerja yang akan menjadi dasar dalam pengamatan kemudian pilih peta dengan nama (**Pada Peta**).
6. Klik tanda panah pada kanan atas untuk menunjukkan lokasi pengamatan. (lokasi kita saat ini). Apabila posisi sudah sesuai, bisa diklik sesuai dengan lokasi yang diamati. (warna hijau). (Pengecekan keaktifan bisa dilakukan dengan menggunakan mode pesawat di Hp).
7. Perhatikan posisi titik terhadap polygon LBS lalu klik tanda titik pengamatan.
8. Isi keterangan titik lokasi seperti nama titik lokasi, lapisan penyimpanan (layer bisa dibuat lebih dari satu sesuai keinginan), foto/dokumentasi, deskripsi dan lainnya.
9. Setelah informasi diisi lengkap lalu pilih tanda ceklist untuk menyimpan titik pengamatan.
10. Informasi akan tersimpan pada lapisan peta dengan nama **Cek LBS**.

Langkah-langkah membuat Poligon menggunakan Aplikasi Avenza Maps :





9. Hasil pengambilan titik dan pembuatan polygon akan tersimpan pada lapisan yang sudah dibuat

10. Ekspor lapisan dalam format yg diinginkan untuk dianalisis lebih lanjut (biasanya dengan format .kml)

Goalnya adalah LBS, jadi mungkin pasti LBSnya tidak sebesar itu oleh karena itu kita harus memverifikasi data spasialnya. Kurang lebih penggunaan Avenza seperti itu dan harapannya dapat bermanfaat untuk kita semua. Hasil ekspor dari Avenza Maps juga dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan aplikasi pemetaan seperti ArcGIS, Global Mapper dan lainnya. Koordinasi antara penyuluh dan dinas atau instansi terkait dalam pemutakhiran data LBS sangat diperlukan.

SESI DISKUSI

Saran oleh perwakilan peserta rapat

Sebaiknya ada waktu-waktu tertentu terkait praktek aplikasi Avenza ini terutama jika dilakukan dilapangan secara langsung. Karena apabila hanya teori apalagi beberapa melalui online mungkin belum bisa maksimal.

Pertanyaan dari Agus Subekti, S.P., M.P.

Mungkin apabila secara online agak kesulitan mungkin prakteknya bisa menggunakan sawah daerah dekat sini, apakah memungkinkan dan nanti kendalanya bagaimana?

Tanggapan dari Khairul Anam, S.P., M.Si

Nalar kita untuk memetakan lahan itu yang akan kita kembangkan, kita tinggal membatasi sawah sesuai dengan citra yang di luar LBS. Titik kritisnya di peta kerja, yang penting batas LBS-nya dibuat apabila memungkinkan sampai skala desa. Dengan luasan setengah hektar kita bisa mendeleniasi. Apabila memungkinkan nanti bisa dikoordinasikan dengan Bapak PJ Swasembada Pangan Kalimantan Barat terkait peta kerjanya hingga tingkat desa karena untuk tingkat kabupaten saja saat ini operasionalnya tidak mudah.

Pertanyaan dari perwakilan peserta rapat

Ketika kita melakukan updating lahan sawah, ada atau tidakkah penambahan lahan sawah diluar LBS? apakah ada pengakuan terkait usulan LBS sebagai dasar legalitas?

Tanggapan Heru Chandra S.P., M.P.

Sekitar akhir tahun 2025 ATR/BPN menyurati daerah untuk melakukan update luasan lahan sawah terbaru dengan bukti berupa polygon.

Tambahan pendapat oleh perwakilan peserta rapat

Benar adanya surat tersebut, dari ATR, Dinas dan PUPR harus duduk bersama berkoordinasi mengenai hal ini. Untuk itu kami mengundang PUPR dan Dinas untuk berdiskusi agar tidak terjadi miskomunikasi data terkait LBS.

Tanggapan dari Khairul Anam, S.P., M.Si

Saat ini belum ada satu data satu peta sehingga diharapkan kedepannya begitu. Salah satu langkah kita adalah dengan adanya avenza ini sebagai bukti bahwa kita menyiapkan data ini.

Dokumentasi Kegiatan



NOTULENSI
Sosialisasi Permentan 02 Tahun 2026 dan Petunjuk Teknis
serta Petunjuk Operasional Tanaman Pangan 2026

(berdasarkan Surat Undangan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Nomor B-157/HK.310/H.12.16/01/2026 tanggal 11 Maret 2026)

Hari/Tanggal	:	Jumat, 13 Maret 2026
Metode Rapat	:	Luring dan Daring melalui Zoom Meeting Room
Meeting ID	:	92977235839 Passcode: 123123
Moderator Diskusi	:	Agus Subekti, S.P., M.P. (Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian)
Und & Daftar Und	:	<i>Terlampir</i>
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Jl. Budi Utomo No. 45, Pontianak Utara, Prov. Kalimantan Barat

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat menggelar Sosialisasi Permentan 02 Tahun 2026 dan Petunjuk Teknis serta Petunjuk Operasional Tanaman Pangan 2026 secara luring dan daring, bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat.

Sambutan dari Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat

Kali ini merupakan pertama kalinya BRMP mengadakan koordinasi bersama penyuluh, dalam rangka Sosialisasi Permentan No 02 Tahun 2026 terkait Pengelolaan Bantuan Pemerintah, Dimana peran BRMP menjadi verifikator dari CPCL seluruh Banper di setiap provinsi. Sosialisasi akan disampaikan oleh Pak Agus Subekti, S.T.P., M.P. Ada beberapa catatan dari saya bahwa bantuan pemerintah ini pada pelaksanaannya ini tetap seperti semula dalam artian para penyuluh yang dahulu melakukan identifikasi CPCL untuk Banper ini khususnya yang berada di wilayah binaan masing – masing yang memang benar – benar mengetahui siapa dan Dimana lokasinya untuk Banper ini oleh karena itu, bantuan dari penyuluh kami sangat harapkan untuk mengindetifikasi CPCL secara seksama. Karena nanti pengajuan CPCL baik dari dinas atau penyuluh langsung ini akan tepat jika memang penyuluhnya langsung mengidentifikasi dengan baik. Dari BRMP jangkauan masih jauh sehingga kami bergantung pada penyuluh, sehingga Kerjasama kita sangat penting, harapan saya untuk Kalbar dalam pengusulan CPCL diusahakan tidak terlambat dari program yang ada baik benih dari Dirjen TP, dari alsintan dari Dirjen PSP dan bantuan – bantuan lain. Sehingga, kita selalu monitor agar tidak terlambat. Karena penting melalukan pendampingan program strategis pertanian di Kalbar agar petani dapat mengikuti program – program dari Kementan. Harapan saya data terverifikasi dengan valid dan jelas, jika ada kesulitan atau hambatan yang perlu diskusikan di lingkup Kalbar, tolong bisa disampaikan ke BRMP. Selanjutnya, program Banper ini cukup banyak di Kalbar, karena Kalbar termasuk salah satu lokasi CSR, OPLAH 2025, dan program – program lain. Sarana komunikasi kita para penyuluh kemudian Dinas Kab/Kota, Dinas Provinsi dan BRMP harus kita jaga karena semua memiliki peran. Harapan saya sosialisasi ini mohon diperhatikan kemudian nanti jika ada diskusi kita fasilitasi, apa yang bisa dijawab kita selesaikan, jika tidak kita akan bantu untuk follow up ke pusat.

Paparan

- 1. Sosialisasi Permentan 02 Tahun 2026 oleh Agus Subekti, S.P., M.P.**
- 2. Juknis dan Jukop Dirjen Tanaman Pangan Tahun 2026 oleh Agus Subekti, S.P., M.P.**

Diskusi:

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Provinsi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat - Pak Aswin Hasbarisnandar, S.P., M.P.:

- Terkait permasalahan – permasalahan dari hambatan dinas kabupaten, dinas provinsi, dan BRMP menggunakan sistem bola panas, agar segera dipercepat dan disampaikan ke BRMP.
- Terkait ada dilema seperti SPTJM semoga ada jalan keluar, saya harap ini pertemuan bersifat sosialisasi dan tidak ada lagi pertanyaan lagi terkait form dan persyaratan dan dari Kabupaten dimohon untuk disampaikan pada hari ini.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bengkayang

- Mekanisme pengajuan CPCL berdasarkan Jukop, Dinas Kab/Kota tidak membuat SPTJM, agar administrasi tidak bertele – tele, karena dinas sudah dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh katimker jadi dirasa sudah cukup.
- Mungkin perlu ada Keputusan pakai jalur yang mana.
- Kemudian yang kedua ke lapangan petani yang bertanya apakah bantuan yang kami ajukan satu poktan bisa mendapatkan 2 bantuan dengan berbeda lahan dan komoditas (padi dan jagung), apakah boleh atau tidak?

PPL Kab. Sambas Pak Diyanto

- Banyak dibahas mengenai tingkat dinas kab dan provinsi. Tahun lalu CPCL menggunakan BP jadi tahun ini apakah masih khusus OPLAH apa bisa menggunakan Gapoktana tau BP? Karena di BP lapangan belum menguasai lahan.
- Jika terjadi masalah di lapangan seperti bantuan benih tidak sesuai dengan spek atau tidak baik, apa yang perlu kami lakukan di lapangan?
- Ada petani yang curhat mungkin memang betul kita konsentrasi ke BP, jadi mereka bertanya mereka merasa kurang diperhatikan tidak seperti dulu, karena yang masih berjalan kebanyakan besar yaitu petani.

Tanggapan Pak Agus Subekti:

- Terima kasih atas masukanya dari Kabid TP Dinas TPH Provinsi Kalimantan Barat
- Pertama terkait SPTJM akan kami diskusikan, jika SPTJM selama ini Dinas Provinsi tidak membuat SPTJM, dalam jukop dan juknis memang tidak persyaratan, namun untuk kekuatan kami karena kami tidak tahu kondisi lapangan sehingga kami meminta membuat SPTJM, sehingga kami meminta arahan dari Pak Amin.
- Terkait jalur keluar melihat juknis dan jukop jalurnya memang seperti itu yang harus dilalui seperti Permentan 02 Tahun 2026 yang sudah di tanda tangani oleh Pak Menteri. Kami asal ada dokumen dari TPH maupun Kelsi kami akan mempercepat asal dokumen sesuai dengan Juknis dan Jukop.
- Lalu, pertanyaan ketiga mungkin saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, karena akan dijawab oleh Pak Amin, karena kami belum mempelajari lebih dalam terkait Juknis dan Jukop.
- Untuk pertanyaan Pak Diyanto informasi dari Direktur Serelia terkait siapa CPCL penerima bantuan benih harus BP pada tahun 2025, tetapi kemarin saat pertemuan bisa opsinya Poktan ketika BPnya belum terbentuk. Namun jika BP sudah ada, BP pada saat musim berau BP bisa mengelola lahan tersebut karena sudah membuat MoU dengan pihak pemilik lahan sebanyak 5 tahun. Mohona arahan Pak Amin apakah Poktan bisa jadi penerima bantuan.
- Apakah jika benih yang datang tidak sesuai kualitasnya, saya berpikir ketika petugas penerima barang saat menerima barang harus memastikan kuantitas cukup dan secara kualitas memenuhi kualitas benih seperti label, kondisi fisik. Nanti Bapak harus mentandatangani BAST terkait benih tersebut.

Tanggapan Pak Fazrul Amin Katimker Dirjen TP

- Yang perlu kita cermati lebih ke bantuan benih sebenarnya permentan 02 tahun 2026 yaitu Banper lingkup Kementan.

- Usulan CPCL oleh penyuluh pertanian, penyuluh diberi 2 pilihan pengajuan di bawa ke Katimker atau ke Dinas Kab/Kota.
- Untuk menanggapi pertanyaan Pak Gede, yang kami terbitkan tidak mewajibkan Dinas membuat SPTJM karena sebenarnya di hasil verifikasi sudah menyatakan dokumen tersebut sudah di verifikasi dan diberi materai. Jika BRMP Kalbar meminta SPTJM dikembalikan lagi ke Keputusan BRMP Kalbar. Mungkin bisa dicari solusi dan diskusi terkait tersebut.
- Terkait usulan padi dan jagung, jika musim tanam berbeda tidak masalah. Yang jadi masalah musim tanam yang sama diusulkan 2 komoditas (padi dan jagung) akan menjadi temuan.
- Untuk pertanyaan Pak Diyanto, kami berpedoman Juknis BPSDM yang ranahnya SDM terkait BP, sehingga mewajibkan BP karena ketentuannya seperti itu. Bantuan benih yang kami lebih ke Peningkatan IPnya. Kembali lagi ke MoU dari anggota BP dengan Poktan terkait peningkatan IP atau apa. Kami memang memprioritas kan BP, namun tidak menutup kemungkinan poktan juga dapat menerima bantuan. Untuk menyiesati itu dulu kami minta surat keterangan kenapa tidak diusulkan BP sehingga jadi dasar jika BPSDM menanyakan kenapa poktan tersebut menerima bantuan tsb. Kalau untuk sekarang bukan BP tapi Kelembagaan Petani. Sehingga diidentifikasi saja OPLAHnya sesuai atau tidak. Bisa diusulkan Poktan yang bekerja sama dengan BP.
- Kami meminta bantuan dari P3B yang idealnya teman – teman kecamatan karena skalanya lebih tepat kecamatan, karena bantuan akan di drop langsung di poktan. Jika ada yang tidak sesuai berhak menolak. Benih dari sisi mutu teman – teman P3B tidak bisa memastikan, namun dari sisi fisik teman – teman bisa memastikan kondisi benih yang sampai, seperti varietas, masa edar, dll. BAPB pemeriksa barang yang tanda tangan kalau BAST nanti ada penyedia, penyuluh, P3B dan petani yang tanda tangan.
- Petani yang kurang dipertahatkan balik lagi program disana apa, kami yang bayangkan kegiatan lebih ke BP, sedangkan BP tidak punya lahan, secara langsung itu kembali ke petaninya juga.

Pak Agus:

- Tekait BP kalau meilbhat juknis dan jukop tidak perlu penerima dari BP, untuk OPLAH 2025 BP sudah terbentuk di Kalbar, dengan alasan tertentu Dinas membuat surat keterangan. Jadi kami akan menerima BP atau Poktan sesuai yang diajukan oleh Dinas
- Kami yang menandatangani SPTJM, lalu di juknis dan jukop formatnya berbeda. Untuk di Juknis sama dengan Berita Acara Hasil Verifikasi, sedangkan dari BRMP tidak memeriksa langsung ke lapangan hanya memeriksa dokumen saja. Sehingga kami meminta SPTJM ke Dinas Kab/Kota.

Pak Gede:

- Dari dinas juga tidak memeriksa secara aktual namun secara dokumen saja.

Pak Fazrul Amin:

- Untuk bantuan benih program OPLAH dan CSR harus disebutkan satu musim tanam, karena ada yang menanyakan ke kami jika bagaimana mengusulkan kelompok tani, sehingga perlu di cermati. Kecuali ada kegiatan lain.
- Dulu teman – teman Dinas hanya mengandalkan data Penyuluh, teman – teman BRMP dapat mengandalkan data dari Penyuluh, Dinas Kab/Kota, Dinas Provinsi.
- Kami yang mengampu kegiatan cuman mensyaratkan dokumen yang sesuai di Juknis dan Jukop

Pak Agus:

- Rentang kendali semakin jauh, karena penerima bantuan ada di kecamatan dan kabupaten. Kami menyarankan untuk menghilangkan kata “Menanggung semua kerugian” karena kami tidak memegang keuangan bantuan dan monitor langsung ke lapangan.

Pak Gede:

- Ada satu hal lagi, mereka untuk mempercepat proses pengusulan CPCL seperti administrasi pendukung menyusul, hal ini harus dibenarkan atau mengikuti prosedur yang berlaku. Mengingat waktu yang sudah mepet

Pak Nyoerai – DKPPP Kab. Sekadau

- Terkait percepatan CPCL, Sekadau sudah masuk ke Provinsi, maupun OPLAH, GOGO, CSR, bahkan Reguler. Kami di Kabupaten mengikuti, memang agak janggal karena prosedurnya rumit, besar harapan kami, CPCL yang kami selalu ajukan datanya dari Kawan – Kawan BP jadi kami menggunakan data sama. Saran dari kami bagusya dari katimker langsung ke BRMP. Jika melalui katimker langsung simluhtan muncul.
- Petugas P3B sudah di tunjuk oleh Dinas Sekadau yaitu PPL yang tahu lapangan, besar harapan kami dengan datangnya barang bantuan benih, kami mohon di infokan untuk melakukan pengawalan karena kami ada PBT. Berdasarkan pengalaman tahun lalu jika tidak seperti ini akan sulit.
- Kita akan menyesuaikan program strategis kementan, harapan kami BRMP membawahi teman – teman PPL di Kab, tolong bantuannya BRMP mengingatkan katimker dan petugas yang ditunjuk untuk melakukan laporan bulanan ke Dinas terkait.

Pak Mukiang – Dinas Kab. Landak

- Dalam mekanisme ini penerima bantuan petani, poktan, gapoktan, kelembagaan. Data yang ada poktan itu ada di Simluhtan. Poktan ini kalau disini ada kelengkapan berkas melalui penyuluh yang diusulkan yang mereka yang melakukan verifikasi. Jika penyuluh pertanian yang paham secara detail maka akan berlanjut. Mereka akan membuat nota dinas dan berita acara hasil verifikasi. Kita pernah laporan LTT harian di kec ada petugasnya sendiri sumbernya dari PLL ada selisih data. Sedangkan sekarang dinas kab/kota harus melalui pusat dahulu untuk berkordinasi oleh Penyuluh. Jadi tidak usah diberi pilihan mau jalur mana, mau jalur dinas atau jalur penyuluh.
- Untuk kelengkapan dokumen oleh Petani, titik kordinat per poktan atau per anggota?
- Usulan tentang jagung ke Penyuluh, namun responnya kurang
- CPCL Landak sudah ada persetujuan dari Dinas Prov. sebelum Permentan 02 Tahun 2026 terbit, apakah kami harus perbaharui atau bagaimana?
- Saran dari kami agar menggunakan jalur penyuluh.

Tanggapan Pak Agus:

- Pak Amin mohon arahan apakah boleh diusulkan tidak sesuai juknis/jukop atau harus sesuai
- Pertanyaan tentang Pak Nyoerai itu sama – sama berkordinasi melalui penyuluh, data di rekap oleh BPP, lalu ke Katimker Penyuluh kab/kota tinggal memilih melalui Dinas Kab/Kota atau memilih melalui Kelsi. Dua – duanya dipesilahkan mana yang paling cepat, saya menyarankan agar harmonisasi dari penyuluh dan dinas terjalain maka agar pengusulan CPCL melalui Dinas.
- Untuk pertanyaan Pak Mukiang hampir sama jawabannya dengan Pak Nyoerai. Namun saya sarankan untuk lewat Dinas, karena sudah terbiasa melalui Dinas.

Tanggapan Pak Amin:

- Menanggapi Pak Gede juknis kita diundangkan 27 Januari 2026 oleh Kementan, Jukop tanggal 16 Februari 2026. Bapak keluar dokumen tanggal berapa, setelah tanggal 19 Februari harus mengikuti format juknis dan jukop. Jika bicara ideal, harus lengkap dulu. Disatu sisi kami meminta percepatan, satu sisi juga harus cepat dan tepat juga. Harus ada komunikasi katimker dan dinasnya. Kami dari sisi pengampu kegiatan, kita tetap dari bawah dan professional. Harus dilengkapi, jika ada revisi tinggal dilengkapi saja. Ada catatan juga untuk BRMP, penyusunan baru tahun ini pengurus CPCL, dalam rangka percepatan juga dari dokumen yang masuk dari dinas dan provinsi kadang terlewat dari isi atau belum sesuai kami meminta revisi menyusul, namun dokumennya dipegang terlebih dahulu. Dokumen harus menyesuaikan dengan jukop. Rumitnya bantuan di benih padi, katimker sebelum

menerbitkan usulan CPCL harus dipastikan terlebih dahulu varietasnya. Inventarisasi kesiapan benih yang ada disana. Contohnya Sekadau informasinya siap tanam harus diperiksa dulu benih yang ada disana, disesuaikan varietasnya (misal PT. SHS). Agar cepat dan efisiensi dalam ongkos kirimnya.

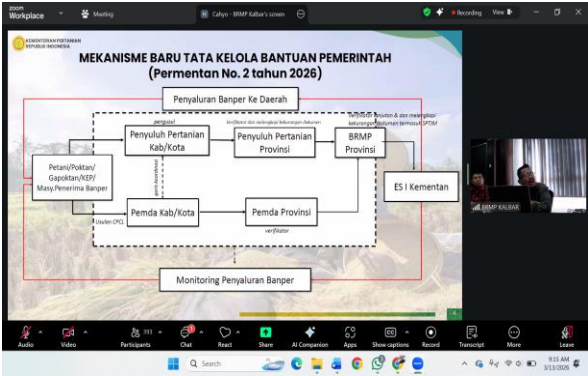
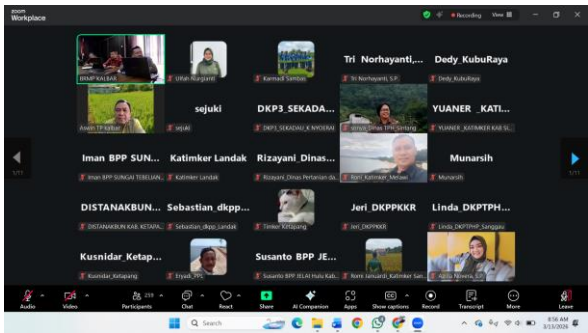
Tanggapan Pak Agus:

- Jika dibawah tanggal permentan 02 Tahun 2026 terbit makan sepertinya bisa diusulkan, agar lebih baik agar Pak Gede tidak perlu menyesuaikan format. Kami pun tidak berani jika tidak sesuai juknis/jukop
- Jika dokumen yang mengikuti juknis sebelumnya maksimal di tanggal 26 Januari 2026 baru bisa di proses dengan aturan lama, jika usulannya setelah permentan terbit, makan harus sesuai baru.

Tanggapak pak Amin:

- Hampir setiap pak direktur sosialisasi menyampaikan CPCL idelanya 2 bulan sebelum tanam, seandainya nilai kontrak diatas 200jt harus membuat jaminan terlebih dahulu. Yang dikontrak harus jelas. Apabila benihnya insitu tidak ada alasan untuk kami tidak mengontrak.

Dokumentasi Kegiatan



NOTULENSI KEGIATAN

Kegiatan	:	Kunjungan Kerja Tenaga Ahli Menteri Pertanian (TAM) Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc.
Agenda	:	Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian
Waktu	:	12 – 14 Mei 2026
Lokasi	:	Kabupaten Mempawah Kabupaten Sambas

▪ **Entry Meeting di Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Barat**

- 1) *Entry Meeting* dilaksanakan di Ruang Rapat BRMP Kalimantan Barat, dihadiri oleh Kepala BBPP Batu Dr. Ir. Ugik, S.ST., M.Si., Plh. Kelsi Provinsi Kalbar Wahyudi, S.Pt., Kabag TU BRMP Kalbar, para Kapoksi BRMP Kalbar, Koordinator Wilayah Penyuluh Prov. Kalbar, dan perwakilan/Tim dari Ditjen LIP. Diawali dengan pemaparan dari Kepala BRMP Kalbar mengenai profil BRMP yang meliputi jumlah pegawai, IP2MP Sungai Kakap, IP2MP Selakau, dan IP2MP Monterado serta fasilitas lainnya seperti Gudang UPBS dan Laboratorium Pengujian Tanah. Dilanjutkan dengan pemaparan alur koordinasi antara BRMP Kalbar dengan penyuluh dan dinas pertanian provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pemaparan tersebut juga disampaikan perkembangan berbagai program strategis pertanian di Kalimantan Barat mencakup Enam Ditjen Teknis, dan pemaparan data Luas Tambah Tanam (LTT), Optimasi Lahan (OPLAH), Cetak Sawah Rakyat (CSR), hingga Brigade Pangan (BP) di Kalbar.
- 2) Kehadiran TAM merupakan representasi Bapak Menteri Pertanian untuk merespon kekecewaan terhadap progres Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang dinilai belum optimal. Kunjungan ini bertujuan untuk memetakan lokasi-lokasi yang bermasalah secara langsung di lapangan guna merumuskan solusi bersama. Penekanan pada monitoring intensif terhadap distribusi dan pemanfaatan bantuan irigasi serta alat mesin pertanian (alsintan)
- 3) Dalam sesi diskusi, TAM menampung beberapa kendala operasional sebagai berikut:
 - Kapoksi Program dan Pengujian BRMP Kalbar (Tietyk Kartinaty, S.P., M.P.): membahas terkait revisi anggaran, terdapat titik terang mengenai pencairan bantuan kendaraan operasional (motor) bagi penyuluh yang saat ini bergabung di BRMP.
 - Kapoksi Pendampingan Modernisasi Pertanian BRMP Kalbar (Agus Subekti, S.P., M.P.): terkait prosedur CPCL yang dinilai birokratis karena setiap revisi harus dikembalikan ke pihak Dinas, serta masalah aksesibilitas data pada Ditjen LIP; penggunaan *Google Form* dalam pelaporan usulan menyebabkan pihak BRMP tidak memiliki akses terhadap database pengusulan tersebut, sehingga menyulitkan monitoring di tingkat balai.
 - Kapoksi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian (Sanusi, SST.): terkait Petani mengeluhkan kendala teknis dalam pembuatan konten *Learning Center System* (LCS) yang terhambat oleh keterbatasan kuota internet di wilayah lapangan.
 - Plh. Kelsi Penyuluh Provinsi Kalbar (Wahyudi, S.Pt.): menyampaikan bahwa Penyuluh saat ini menghadapi beban kerja yang sangat tinggi (multitasking)

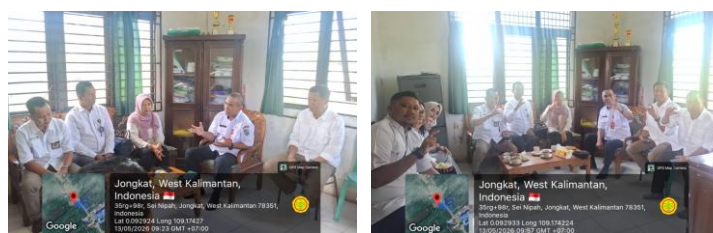
tanpa dukungan anggaran yang memadai, sehingga operasional di lapangan sering terkendala.

- 4) Dalam arahannya, Dr. Pamuji Lestari menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang kuat antar seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung percepatan program swasembada pangan berkelanjutan. Selain itu, apa yang dihadapi di lapangan perlu segera disampaikan agar dapat dicarikan solusi bersama. Fokus pembahasan juga diarahkan pada program CSR yang menjadi perhatian utama Kementerian Pertanian. Dibahas pula dukungan sarana dan prasarana pertanian seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), irigasi, serta penguatan Brigade Pangan untuk mendukung percepatan tanam dan peningkatan produksi pertanian di Kalimantan Barat.



▪ **Monitoring Kegiatan CSR, OPLAH, dan Brigade Pangan di 3 Titik Lokasi di Kabupaten Mempawah**

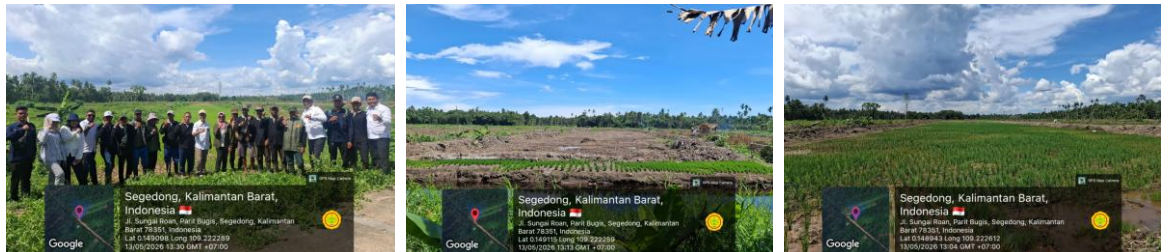
- 1) Koordinasi awal dengan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Mempawah (H. Arifin, S.Pd.SD., M.Pd.), beserta jajaran Kabid Tanaman Pangan, PSP, dan Penyuluh Pertanian. Dalam diskusi tersebut, dibahas progres krusial mulai dari Oplah, Brigade Pangan, dan CSR.
- 2) Kepala DPKPP Kab. Mempawah menyampaikan bahwa meski potensi daerah sangat baik, kendala mekanisasi seperti ketersediaan combine harvester masih menjadi tantangan. Terkait pengelolaan 31 Brigade Pangan (BP) yang ada, perlu diusulkan adanya rotasi alsintan dari BP yang non-aktif ke BP yang aktif guna optimalisasi alat.



- 3) Kunjungan pertama pada lahan CSR 2025 milik BP Sepakat Berjaya di Desa Peniti Luar seluas 171 ha. Meskipun telah didukung 3 unit Rice Transplanter, kendala utama yang dihadapi adalah intrusi air asin ke saluran irigasi yang meningkatkan salinitas tanah dan mengancam pertumbuhan padi. Sebagai solusi, perlu diusulkan perbaikan infrastruktur pengairan untuk membentengi lahan dari air asin dilengkapi dengan foto udara dan poligon titik-titik pintu air.



- 4) Selanjutnya, lokasi CSR 2025 BP Mitra Cahaya Surya di Desa Peniti Dalam II yang mengelola lahan seluas 209 ha dengan dukungan 3 unit Rotavator Rotari dan 3 unit Power Thresher. Di lapangan, ditemukan hambatan berupa terbatasnya mobilitas alsintan akibat ketiadaan jembatan penghubung antar lahan (agar berkoordinasi dengan Pemerintah desa setempat) serta tingginya biaya bahan bakar. Selain itu, perlunya pengusulan rencana instalasi 2 unit Irigasi Perpompaan (Irpom) guna menjamin ketersediaan air secara lebih efisien.



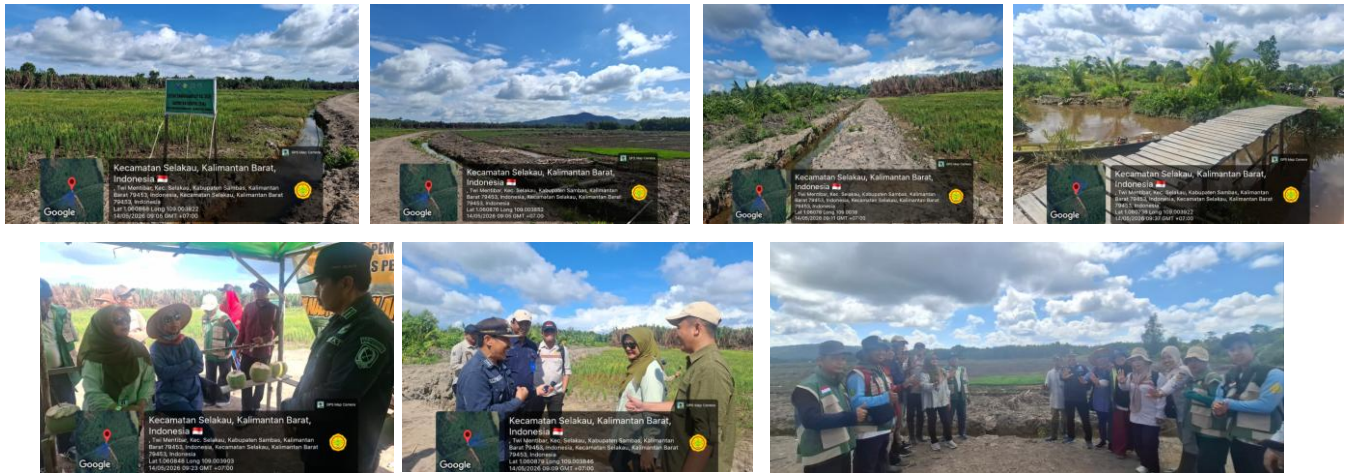
- 5) Dilanjutkan pada lokasi OPLAH 2024 milik BP Maju Bersama (salah satu BP Berprestasi) di Desa Peniraman seluas 255 ha yang memiliki mekanisasi lengkap, mulai dari Traktor Roda 2, Pompa 3 inch, Combine Harvester, hingga Drone Pertanian. Tantangan krusial di lokasi ini adalah status lahan tadah hujan yang kerap mengalami kekeringan ekstrem saat musim kemarau, terutama saat cadangan air permukaan nihil. Solusi yang ditekankan oleh Manager BP dan Petani adalah usulan penambahan program pompanisasi yang masif serta perbaikan jaringan irigasi (Irpom) agar potensi lahan yang luas ini tetap dapat berproduksi secara optimal sepanjang tahun. Penyuluh agar segera membuat proposal usulan untuk pembuatan sumur bor dilengkapi dengan foto udara dan poligon titik-titik pintu airnya. Kendala lainnya, lokasi ini pada dasarnya bisa 3x tanam walaupun terkendala ketersediaan air, namun pada MT 3 petani tidak menyerahkan kepada BP sesuai dengan kesepakatan/MoU antara BP dengan Petani



▪ **Meninjau Lokasi CSR di Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas**

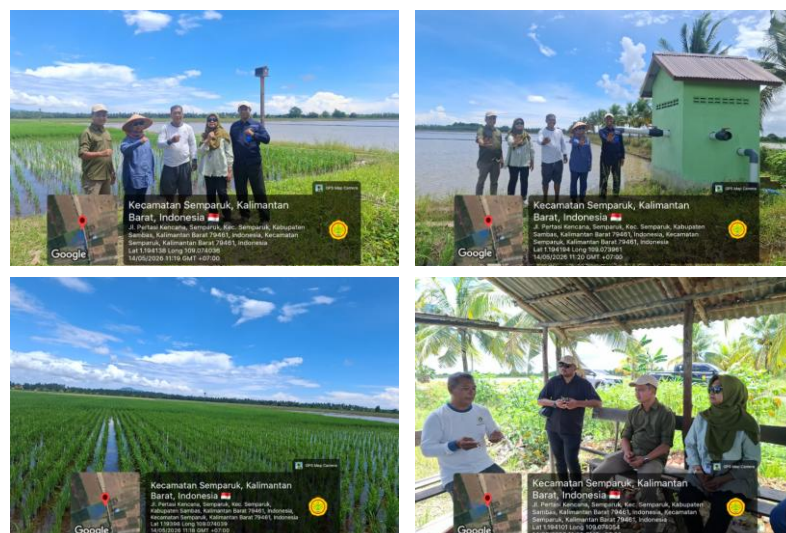
- 1) Ketersediaan Sarana: Unit *Combine Harvester* telah tersedia di lokasi.
- 2) Permasalahan Infrastruktur: Dibutuhkan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk mobilisasi alat, namun perlu verifikasi kewenangan status lahan agar sesuai peruntukan pertanian; tanggul bagian ujung kurang tinggi, mengakibatkan risiko luapan air.
- 3) Solusi Irigasi: Perlu pengadaan pompa air. Disarankan mengusulkan pembuatan denah pompa/pintu air melalui aplikasi SIPURI dengan koordinasi intensif antara Dinas PUPR dan BWS.

- 4) Kendala Agronomis & Sosial: Kondisi lahan salin (payau) memerlukan penggunaan benih lokal yang adaptif; Tingginya biaya operasional akibat harga BBM; Masalah pascapanen: Penyerapan gabah oleh Bulog rendah karena kapasitas gudang penuh.



■ Meninjau Lokasi PM-AAS di Kecamatan Sempuruk, Kabupaten Sambas

- 1) Teknologi: Penerapan metode *Advanced Agriculture System* (adaptasi teknologi Arkansas, AS) dengan sistem tanam rapat, manajemen air *Alternate Wetting and Drying* (AWD), dan *Smart Farming*.
- 2) Potensi Hasil: Optimisme hasil 8 ton/ha (saat ini 6-8 t/ha) dengan indeks pertanaman IP 300.
- 3) **Permasalahan Air:** Jarak sumber air sungai mencapai 4 km. Kurangnya saluran irigasi sekunder mengakibatkan penurunan drastis hasil panen pada periode April-Mei (hanya 1 ton/ha).
- 4) Rencana Pengembangan & Hilirisasi: Kesiapan ekspor beras premium (estimasi harga Rp17.000 - Rp18.000/kg); Target penyediaan pasokan beras mandiri untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalbar.
- 5) Tindak Lanjut & Usulan: Kebutuhan alat *separator* beras dan *color sorter* untuk standarisasi beras premium; **Pengusulan pembangunan saluran sekunder melalui aplikasi SIPURI oleh Penyuluh** dengan penggunaan panel tenaga surya untuk efisiensi energi pengairan.

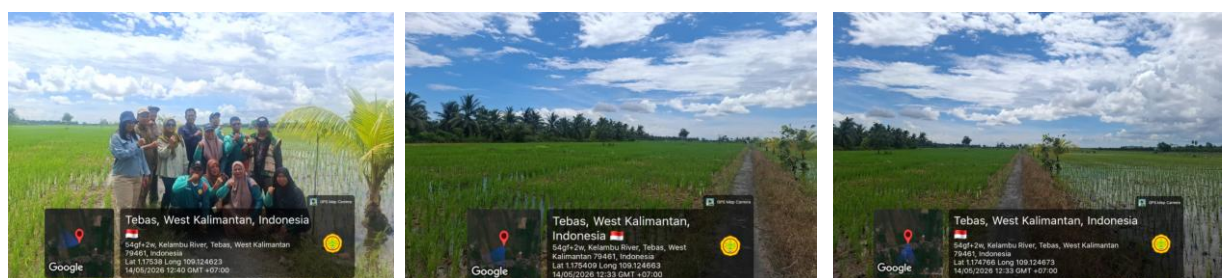


- **Monitoring Lahan OPLAH 2024/2025 dan Lokasi CP/CL IRPOM-IRPIP 2026 dan PM-AAS (Implementasi Pompa Tenaga Surya) di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas**

- 1) Teknologi: Melalui *Competitive Grant* ICARE Kalimantan Barat oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) di Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, terdapat Implementasi teknologi modern salah satunya melalui instalasi Pompa Air Aksial Tenaga Surya (*Solar Power Axial Pump*) berkapasitas 10 kW untuk mengairi sawah seluas 10 hektar. Pompa ini memanfaatkan air permukaan di saluran tersier dengan perbedaan tinggi maksimal 3 meter, menjamin kelembaban lahan saat Musim Tanam (MT) 3 dengan teknologi ramah lingkungan. Kapasitas pemompaan sebesar 375 m³/jam apabila akan digunakan untuk pengairan padi luasan 1 ha (10.000 m²) misal ketinggian air 6 cm volume air setara 600 m³, sehingga waktunya setara 1,6 jam.



- 2) Status Pertanaman: Telah mencapai IP 250.
- 3) Ketersediaan Alsin: Tersedia TR 2, Rotavator, dan Drone Pertanian.
- 4) Kebutuhan Mendesak: Unit *Combine Harvester* (saat ini masih dalam tahap usulan); **Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi melalui sistem pipanisasi.**
- 5) Kendala Operasional: Mahalnya harga BBM untuk pengoperasian alat mesin pertanian.
- 6) Tindak Lanjut: PPL diarahkan untuk segera mengusulkan perbaikan jaringan irigasi melalui aplikasi SIPURI.



Notulensi Pertemuan

(berdasarkan Surat Und Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Nomor B-602/LB.010/H.12.16/07/2026 tanggal 28 Juli 2026)

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Agenda : *Focus Group Discussion* (FGD) Pelaksanaan Teknologi Budidaya Pertanian
Modern *Advanced Agriculture System* (PM-AAS) di Kabupaten Sambas
Pimpinan Rapat: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat
Peserta Rapat : (Und Terlampir)
Tempat : Sekretariat ICARE Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas

Tujuan FGD

- Mengidentifikasi kesiapan infrastruktur dan SDM petani di Kabupaten Sambas untuk penerapan teknologi PM-AAS.
- Merumuskan solusi atas kendala pembiayaan dan adopsi teknologi pertanian modern.
- Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) implementasi PM-AAS.

Arahan/Pembukaan oleh Kepala BBRMP Kalimantan Barat

- Pada kesempatan ini dengan adanya kunjungan lapang pelaksanaan CG ICARE Kalimantan Barat dari Ibu Wage (BRMP Padi), maka kami memanfaatkan waktu beliau juga untuk pertemuan membahas FGD PM-AAS bersama dinas dan petani kooperator terkait seperti Pak Sukiman dan Brigade Pangan (BP) Sahabat Lumpur.
- Pelaksanaan kegiatan ini lebih banyak berdiskusi bagaimana dan teknologi PM-AAS seperti apa yang dibutuhkan di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas.
- Undangan ini terbatas, harapannya peserta yang terlibat dapat berdiskusi lebih dalam dan menyampaikan perkembangan PM-AAS di Kabupaten Sambas

Ringkasan Pemaparan Materi (Pengantar)

Narasumber 1: Dr. Wage Ratna Rohaeni, S.P., M.Si. (Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi)

- Juknis PM-AAS yang diterbitkan baru untuk padi sawah
- **Output hari ini: merancang juknis spesifik lokasi padi rawa berdasarkan prinsip utama pertanian modern PM-AAS (pemilihan varietas, teknis dan fase penting PM-AAS rawa: teknis tanam rapat dalam baris, efisiensi sumber daya, mekanisasi pertanian, implementasi berbasis korporasi/skala luas, intensifikasi produksi, spesifik lokasi)**
- Pertanian Indonesia sudah harus masuk mengimplementasi teknologi modern
- Produksi Padi 2025: proyeksi 60,34 juta ton GKG dan 34,77-35,6 ton beras, Indonesia bertarget menjadi lumbung pangan dunia 2045
- Pertanian Modern: mengintegrasikan IoT drone, GPS, dan otomatisasi untuk optimasi produksi, efisiensi, kualitas dan keberlanjutan ekonomi petani
- Tantangan SDM Petani: mayoritas petani berusia 51 – 60 tahun, Pendidikan rendah, usaha tani skala kecil, sangat bergantung tenaga kerja keluarga, biaya tanam mahal
- Adopsi Arkansas Model: PM-AAS mengadopsi praktik Delta Arkansas: tanam benih langsung mekanisasi penuh, manajemen intensif hara dan irigasi berbasis data

Narasumber 2: Didik Saifuddin Anhsori, S.T.P. (BBRMP Kalimantan Barat/ Pelaksana Harian PM-AAS di Kalbar)

- Pengantar : Demfarm PM-AAS di Sambas pada 2 Kecamatan di Tebas (Desa Mensere, Sungai Kelambu, Pusaka) dan Semparuk (Desa Semparuk, Singaraya)

- Kendala PM-AAS di lapangan :

Tradisi Tanam Pindah: Mayoritas petani masih sangat terbiasa dengan sistem tanam pindah secara konvensional.

Kendala Pengolahan: Sebagian lahan tidak dapat diolah sempurna (rutin) karena akses air irigasi yang sulit dan keterbatasan alat pengolahan tanah.

Alat Tanam Sederhana: Banyak petani yang mengatasi kendala lahan tersebut dengan masih menggunakan alat tugal tradisional untuk tanam pindah.

Dilema Kerapatan Tanam: Pengalaman masa lalu menunjukkan populasi tanam yang terlalu rapat memicu iklim mikro yang lembap, menyebabkan peningkatan serangan hama dan risiko gagal panen, Tingkat populasi tanaman yang tinggi berbanding lurus dengan kebutuhan pupuk yang semakin meningkat, Daya Tebus Terbatas: Tingginya kebutuhan pupuk seringkali membentur fakta bahwa petani belum tentu mampu menebus atau mengakses kuota pupuk subsidi yang dibutuhkan.

Peluang Mekanisasi: Pengenalan teknologi *rice transplanter* di Sambas telah menunjukkan hasil yang menjanjikan proses budidaya menjadi jauh lebih cepat, rapi, dan meminimalkan tenaga kerja manusia. **Namun**, kita tetap harus mengakomodir catatan teknis dari petani: kebutuhan *tray* semai yang meningkat drastis, serta pengaturan setelan pabrik untuk jarak tanam dalam barisan (sekitar 10 cm) yang dinilai kurang rapat untuk memaksimalkan anakan produktif.

- Solusi PM-AAS :

Pengolahan & Tata Air: Fokuskan PM-AAS awal pada pembenahan tata air irigasi mikro serta fasilitasi akses kolektif alat pengolahan tanah (traktor) melalui skema UPJA agar lahan siap ditanam dengan optimal.

Presisi & Proteksi: Lakukan modifikasi setelan *transplanter* agar sesuai standar agronomi lokal. Terapkan sistem peringatan dini (*smart farming*) dan PHT untuk memitigasi risiko hama akibat jarak tanam rapat.

Kelembagaan Korporasi: Tingkatkan peran koperasi petani/ UPJA untuk mengonsolidasikan pengadaan *tray* semai dan pupuk secara massal demi menekan biaya modal dan memastikan ketersediaan nutrisi tepat waktu.

Hasil Diskusi

1. Petani (Pak Sukiman)

- Kalimantan lahannya ekstrem, kandungan unsur mikro di Kalimantan (kelebihan unsur zat besi dan zat asam), pupuk makro-mikro khusus Kalimantan juknis agar dibedakan
- Budaya petani yang sulit (geografis & kultur tanah yang berbeda), mohon agar usulan jaringan/infrastruktur irigasi agar diubah dari petani ke atas (direktorat terkait) karena kebutuhan irigasi yang berbeda
- Saya ikut juknis 10% juknis PM-AAS yang telah disusun dan 90% pakai cara tanam dari Petani di Banyuasin. Inti PM-AAS yang saya tangka pada peningkatan produktivitas dari 5 ke 10 ton, dan seterusnya karena kondisi geografis lahan yang berbeda. SDM petani sangat rendah,

- Proses PM-AAS di Sambas:

Pengolahan Lahan: bisa olah lahan 1x dengan syarat irigasi sempurna (jika tidak, perlu dilakukan 3x proses olah lahan). Di rawa ada lapisan pirit sehingga perlu olah tanah semakin dalam semakin bagus (ada 2 solusi untuk zat besi dengan pencucian tanah dan pengapuran) dan perlu dibuat peta lahan dari BRMP SDLP.

Pengaplikasian Herbisida Pratumbuh (Merk *Eros Gold*) spesifik gulma dan selektif pencegahannya 1-2 daun diaplikasikan saat penyemprotan keong emas 2 -3 hari sebelum Tabela. Untuk mengatasi gulma pada waktu 20 HST. Sistemik tidak direkomendasikan.

Pemupukan di Semparuk sbb:

Pemupukan 1 = urea awal (7 hari setelah tebar) pada pemupukan pertama 35% dari total 1 ha 200 kg

Pemupukan 2 = 65% sisanya dipakai saat tanaman 13 HSS, 5 hari kemudian NPK,

Pemupukan 3 = selisih 5 hari 200 kg NPK (50%)

Pemupukan 4 = selisih 5 hari lagi NPK 200 kg (50%)

Pemupukan 5 = Phospat SP-36 atau fertipos 100 kg

Pemupukan 6 = Phospat (SP-36/Fertiphos) 50 kg, KCl 50 kg

Memperkuat perakaran saat penggunaan Phospat pada pemupukan 5 dan 6 saat tanah semakin gembur dan akarnya semakin panjang

Aplikasi Insektisida dan Fungsida + pupuk daun umur 15 HSS, umur 25-30 HSS penyemprotan Insektisida & Fungsida lagi + Pupuk daun

Hama wereng coklat dan hijau petani harus mengetahui jam 5 – 6 sore terjadi burung laying-layang dan burung walet pada 25 – 30 HSS. Aplikasi APH (Agen Pengendali Hayati) bersifat makhluk hidup disebut juga pestisida nabati jenisnya generic untuk hama spesifik seperti wereng, dll.

saat Padi pengisian muda pemberian fungsida dan pupuk daun (MKP) pada umur 45 HSS pada daun usia mulai menguning (bunting muda). MKP berfungsi untuk meningkatkan daya imum daun.

Tanggapan:

1. Perlu bantuan ZPT dan Pupuk Daun (MKP) serta pengawalan HPT yang ketat
2. Perlu ada penyusunan untuk PM-AAS Rawa Lebak
3. Modernisasi harus segera masuk untuk petani-petani yang kesulitan untuk olah tanah (sehingga olah tanah sifatnya wajib), perlu bantuan untuk Kalbar berupa traktor olah tanah yang sekali jalan untuk olah tanah sempurna
4. Tanam rapat untuk menambah populasi untuk peningkatan LTT PM-AAS, perlahan penerapan modernisasi masuk (mengikuti prinsip PM-AAS)

2. Petani Milenial (Brigade Pangan Sahabat Lumpur)

- Efisiensi waktu dan biaya (1 ha = 3,5 jt)
- Rata-rata petani mau melaksanakan PM-AAS namun terkendala di minimnya alsintan dan dapog/semai
- Varietas yang digunakan Inpari 32
- Dapog di Kec Semparuk jumlah ± 700 pcs

Tanggapan:

1. Kita lakukan tanam rapat
2. Kenaikan produktivitas di Kalbar 120% = misal awalnya 3 – 4 ton menjadi 6 ton
3. Tim PPL selain ada kenaikan sesuai juknis kita usahakan ada kenaikan 2x lipat
4. Akan dihitungkan analisis usahatannya:
Tanam rapat (Tabela dengan kerapatan 10cm) = ± 600.000 /ha
Tanam rapat (dari dapog sampai tanam) = $\pm 1.500.000$ /ha dengan jarak tanam 10 cm
5. Kita perlu efisiensi benih (maksimal di 70-80 kg/ha)
6. Perlu modifikasi alat Tabela mendukung pelaksanaan PM-AAS
7. Di semparuk yang bisa diaamti dari beberapa cara menggunakan drumseeder dan transplanter bisa semua dilaksanakan karena ada beberapa tempat wilayah yang daerahnya agak tinggi dan agak rawa, daerah yang banyak air bisa menggunakan transplanter, untuk drumseeder untuk wilayah yang bisa diatur airnya, untuk mengatasi gulma. Di gersik karena airnya sedang sulit gulmanya yang lebih banyak, drumseeder lebih rapih dan perkembangan anakan optimal, untuk bboardcast bisa juga dipertimbangkan karena biaya lebih murah karena petani mampu
8. Ada beberapa perlakuan benih (broadcast, tapin, dll) tetapi proses pengolahannya sama, agar bisa dilihat perbedaannya

Rencana Tindak Lanjut

No	Poin Pembahasan	Perumusan	Tindak Lanjut
1	Pengolahan Lahan	Di rawa ada lapisan pirit. Pirit dan besi muncul dimusim kemarau, sehingga perlu olah tanah semakin dalam semakin bagus (ada 2 solusi untuk zat besi dengan pencucian tanah dan pengapuran) dan perlu dibuat peta lahan dari BRMP SDLP.	
2	Varietas (batang kokoh, tahan rebah, tahan pirit, Fe, dan blas)	Inpari: Inpari 32, Inpari 36, Inpari 37 Inpara: Inpara 2, Inpara 6, Inpara 8 Biofortifikasi: Inpara 11	
3	Pengaplikasian Herbisida Pratumbuh	Merk Eros Gold: spesifik gulma dan selektif pencegahannya 1-2 daun diaplikasikan saat penyemprotan keong emas 2 -3 hari sebelum Tabela. Untuk mengatasi gulma pada waktu 20 HST. Sistemik tidak direkomendasikan.	
4	Pemupukan	Pemupukan 1 = urea awal (7 hari setelah tebar) pada pemupukan pertama 35% dari total 1 ha 200 kg, Pemupukan 2 = 65% sisanya dipakai saat tanaman 13 HSS, 5 hari kemudian NPK, Pemupukan 3 = selisih 5 hari 200 kg NPK (50%), Pemupukan 4 = selisih 5 hari lagi NPK 200 kg (50%), Pemupukan 5 = Phospat SP-36 atau fertipos 100 kg, Pemupukan 6 = Phospat (SP-36/Fertiphos) 50 kg, KCl 50 kg Memperkuat perakaran saat penggunaan Phospat pada pemupukan 5 dan 6 saat tanah semakin gembur dan akarnya semakin panjang	
5	Aplikasi Insektisida dan Fungsida + pupuk daun	umur 15 HSS, umur 25-30 HSS penyemprotan Insektisida & Fungsida lagi + Pupuk daun (MKP). saat Padi pengisian muda pemberian fungsida dan pupuk daun (MKP) pada umur 45 HSS pada daun usia mulai menguning (bunting muda). <u>MKP berfungsi untuk meningkatkan daya imum daun.</u>	Rekomendasi Tambahan
6	Hama	Serangan wereng coklat dan hijau, petani harus mengetahui jam 5 – 6 sore terjadi burung laying-layang dan burung wallet. Aplikasi APH (Agen Pengendali Hayati) bersifat makhluk hidup disebut juga pestisida	

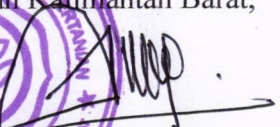
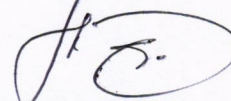
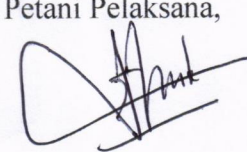
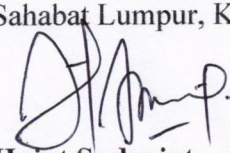
No	Poin Pembahasan	Perumusan	Tindak Lanjut
		nabati jenisnya generic untuk hama spesifik seperti wereng, dll (pada 25 – 30 HSS)	
7	Kejadian rebah dilahan rawa seperti apa?	PM-AAS di Desa Sungai Kelambu tidak rebah, apabila terjadi rebah perlu digunakan Silika (namun perlu dirumuskan berapa besar penggunaan silika pada tanaman?)	
8	Bagaimana penggunaan ZPT/ <i>Booster</i> ?	Penambahan arang sekam sebagai sumber silika alami untuk memperkuat batang tanaman dan mencegah risiko rebah	Rekomendasi Tambahan
9	Penggunaan Dekomposer	Pemakaian Dekomposer (apa saja yang penting ada kandungan mikrobanya) diberi perlakuan awal dimana sebelum 24h diberi gula dan air cucian beras.	
10	Penggunaan Dolomit	Untuk menetralkan pH (4-5) menggunakan dolomit,	Perlu dirumuskan lebih lanjut mana yg utama dan opsional?
	Penggunaan Asam Humat		

Kesimpulan

- **Perlunya Adaptasi Teknologi PM-AAS Spesifik Lokasi:** Pelaksanaan teknologi *Modern Advanced Agriculture System* (PM-AAS) di Kabupaten Sambas sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Namun, penerapan ini memerlukan penyusunan petunjuk teknis (juknis) yang spesifik untuk lokasi lahan padi rawa, tidak hanya rawa pasang surut tetapi juga rawa lebak. Juknis ini harus disesuaikan dengan kondisi geografis lahan di Kalimantan, terutama untuk mengatasi masalah tingginya kandungan unsur zat besi, zat asam, dan keberadaan lapisan pirit.
- **Tantangan Sumber Daya dan Budaya Petani:** Implementasi pertanian modern menghadapi tantangan besar dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), di mana mayoritas petani berusia 51 – 60 tahun dengan tingkat pendidikan yang rendah dan bergantung pada tenaga kerja keluarga. Selain itu, petani masih terikat pada tradisi tanam pindah konvensional menggunakan alat sederhana, serta dihadapkan pada dilema tanam rapat yang dapat memicu kelembapan, serangan hama, dan peningkatan kebutuhan pupuk yang sulit ditebus oleh petani.
- **Solusi Teknis Budidaya dan Infrastruktur:** Untuk menyukseskan PM-AAS, diperlukan perbaikan infrastruktur tata air irigasi mikro serta pengolahan tanah yang sempurna secara rutin. Kendala zat besi dan pirit pada lahan rawa dapat diatasi dengan pengolahan tanah yang dalam, pencucian tanah, dan pengapuran menggunakan dolomit. Dari sisi agronomi, diperlukan pemilihan varietas yang tahan rebah dan tahan pirit (seperti varietas Inpari dan Inpara), penggunaan dekomposer, ZPT/*Booster*, silika, serta penerapan sistem peringatan dini untuk PHT untuk mengendalikan hama penyakit secara ketat.
- **Penguatan Kelembagaan dan Mekanisasi:** Untuk mengatasi kendala keterbatasan alat dan mahalnya biaya, diperlukan modernisasi pertanian melalui fasilitasi akses kolektif alat pengolah tanah (traktor) dan modifikasi alat tanam (*rice transplanter*) melalui skema Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Peran kelembagaan korporasi atau koperasi petani harus ditingkatkan untuk mengonsolidasikan pengadaan sarana produksi (seperti tray semai dan pupuk) secara massal, sehingga dapat menekan biaya modal dan memastikan ketersediaan kebutuhan petani tepat waktu.

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 30 Juli 2026

Para pihak yang Menandatangani:

	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat,  Anjar Suprpto, S.T.P., M.P. NIP. 197209122005011001
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi,  Dr. Wage Ratna Rohaeni, S.P., M.Si. NIP. 198505072011012013	Kepala Unit Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat,  Suyatno, S.P., M.Sos. NIP. 197312252006041001
Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas,  M. Syafaat, S.P. NIP. 198105032009021001	Katimker Penyuluh Kab Sambas,  Anshari, S.Pt. NIP. 197201011992031013
Koordinator Penyuluh Kec Tebas,  Taupit, A.Md. NIP. 198111282017061001	Koordinator Penyuluh Kec Semparuk,  U. Nashiruddin NIP. 198607212017061001
Petani Pelaksana,  Sukiman	Petani Milenial Pelaksana (Brigade Pangan Sahabat Lumpur, Kec Semparuk),  Hajat Sudrajat



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT**

Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak Utara, Kota Pontianak 78241
Telp. (0561) 882069 Fax. (0561) 883883
Website: www.kalbar.brmp.pertanian.go.id E-mail: brmp.kalbar@pertanian.go.id

Nomor : B-602/LB.010/H.12.16/07/2026 Pontianak, 28 Juli 2026
Sifat : **Segera**
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : *Focus Group Discussion* (FGD) Pelaksanaan Teknologi
Budidaya Padi PM-AAS di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

Kepada Yth.:
Daftar Undangan (Terlampir)
di -
Tempat

Dalam rangka peningkatan produksi padi melalui penerapan budidaya padi Pertanian Modern – *Advanced Agriculture System* (PM-AAS), bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan hadir dalam ***Focus Group Discussion* (FGD) Pelaksanaan Teknologi Budidaya Padi PM-AAS di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat** yang akan dilaksanakan pada.

Hari/Tanggal : Kamis/ 30 Juli 2026
Waktu : 08.30 WIB – selesai
Tempat : Sekretariat ICARE Kalimantan Barat
Jl. Raya Mak Rampai, Kec. Tebas, Kab. Sambas
Agenda : *Terlampir*

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar,

Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
NIP. 197209122005011001

Lampiran 1. Surat Kepala BBRMP Kalimantan Barat
Nomor : B-602/LB.010/H.12.16/07/2026
Tanggal : 28 Juli 2026
Hal : *Focus Group Discussion* (FGD)
Pelaksanaan Teknologi Budidaya Padi PM-AAS di
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

Daftar Undangan

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas
3. Katimker Penyuluh Kabupaten Sambas
4. Koordinator Penyuluh Kecamatan Tebas
5. Koordinator Penyuluh Kecamatan Semparuk
6. Dr. Wage Ratna Rohaeni, S.P., M.Si. (Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi)
7. Bapak Sukiman (Petani Pelaksana PM-AAS)
8. Manajer Brigade Pangan Sahabat Lumpur
9. Site Manajer ICARE Kalimantan Barat



Lampiran 2. Surat Kepala BBRMP Kalimantan Barat
Nomor : B-602/LB.010/H.12.16/07/2026
Tanggal : 28 Juli 2026
Hal : *Focus Group Discussion* (FGD)
Pelaksanaan Teknologi Budidaya Padi PM-AAS di
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

JADWAL TENTATIF

**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PELAKSANAAN TEKNOLOGI BUDIDAYA PADI
PM-AAS DI KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT**

Kamis, 30 Juli 2026

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.30-09.00	Registrasi	
09.00-09.05	Pembukaan oleh MC	
09.05-09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
09.10-09.15	Pembacaan Do'a	
09.15-09.25	Sambutan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Barat	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Barat
09.25-09.30	Foto Bersama	
09.30-10.30	Paparan Materi terkait PM-AAS	Dr. Wage Ratna Rohaeni, S.P., M.Si. (BRMP Padi)
10.30-11.55	Pelaksanaan FGD dan/atau Diskusi	Moderator
11.55-12.00	Penutupan oleh MC	



**NOTULENSI DISKUSI SEMINAR PROPOSAL KKEGIATAN
BBRMP KALIMANTAN BARAT TA. 2026**

(berdasarkan Nota Dinas Kepala BBRMP Kalbar B-551/TU.010/H.12.16/07/2026)

Hari/Tanggal : **Senin, 27 Juli 2026**

Pimpinan Rapat : **Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
(BBRMP) Kalimantan Barat**

Moderator : **Tietyk Kartiaty SP., MP
Abdullah Umar, S.P., M.Sc.
Sution, S.P., M.P.**

Notulen : **Risma Mayora Lamtina Tinambunan, SST.
Mahdalena, S.Si.
Sumayanti, S.P.**

Tempat : **Aula Rapat BRMP Kalimantan Barat**

Arahan :

1. Penyampaian progres capaian kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab sampai dengan pertengahan tahun sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan. Melalui Seminar Tengah Tahun, dilakukan pembahasan terhadap kendala yang dihadapi serta perumusan solusi dan langkah tindak lanjut untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kepada Kepala Balai Besar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sekaligus sebagai sarana pengendalian dan monitoring oleh Bidang Program dan Pengujian guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, target, dan ketentuan yang berlaku.
2. Kepada yang presentasi fokus pada output-outputnya, apa yang akan dicapai, yang sudah tercapai berapa, jika ada kesulitan yang mendasar disampaikan sehingga nanti ada penyelesaian oleh karena itu desain seminar tengah tahun ini bagaimana kita bisa menyelesaikan sesuai dengan target, baik target waktu, kualitas dan kuantitas dari kegiatan kita.
3. Seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan

Sesi I

1. Pengujian Instrumen Pertanian/Laboratorium Terstandar – Astri Oktafiani, S.P.

Masukkan :

a. Pak Sution

- Kita akan melakukan pembangunan laboratorium mutu benih dan mutu beras. Kita juga punya Gudang benih. Perlu didiskusikan ruangan yang akan digunakan, Karena saya pikir untuk lab benih dan beras tidak bisa untuk digabung. Perlu ruang khusus dan masing-masing.

b. Pak Gufroni

- Laboratorium telah berada pada posisi standar yang bagus, hanya perlu

didukung lagi dari alat dan tenaga. yang perlu kita pikirkan yaitu generisasi

- Terkait pelatihan, apa tidak sebaiknya melalui pihak internal BRMP sendiri. Kita punya lembaga-lembaga yang mendukung karna lebih sinkron dan tahu hal-hal yang kita perlukan.

Tanggapan :

- a. Kita sudah ancar-ancar dan mensurvei lokasi. Gudang UPBS akan kita slotkan di belakang semua dan akan kita renovasi dan penyelesaian perbaikannya di bulan Agustus sebelum benih datang, agar Lorong bersih dan steril dan di bawah bisa kita gunakan sebagai lab. Atas kiri kanan akan kita alokasikan sebagai laboratorium mutu benih dan mutu beras Untuk lab mutu benih dan mutu beras akan kita gabungkan. Karena untuk pengujian, hanya untuk ruang lingkup terkait pengujian uji mutu beras dan benih. Untuk pengujiannya ada tanah, mutu benih.
- b. Sudah diusakan narasumbernya dari brmp, namun hasilnya tidak memuaskan. Sehingga dibantu oleh konsultan

2. ICARE – M. Zuhra, SST., MP.

Masukkan :

- a. Pak Sution
 - Kegiatan ESF, besok akan diadakan workshop ICARE di Manado. PIU diharapkan untuk hadir. Yang diharapkan hadir pengurus koperasi, site manager, fasilitator. Untuk CG, dan MG bisa diundang melalui PMU
 - Ada dua koperasi belum ada **mitra**, karena faktor pergantian pengurus. Koperasi yang melakukan pergantian pengurus perlu mengurus akta notaris biar pergantian pengurus menjadi sah.
 - Akan direncanakan kegiatan ESF oleh PMU di Kalbar sebagai tuan rumah. Sehingga kita perlu siap-siap. Namun, belum dapat informasi terkait waktu pelaksanaan
- b. Pak Gufroni
 - Apa sudah terjadi ada perubahan varietas di lokasi ICARE. Karena merupakan salah satu indikator keberhasilan kegiatan
 - Terkait produktivitas, apakah masih rendah/menengah/meningkat dalam kegiatan ICARE. Selanjutnya apa tindak lanjut yang kita lakukan setelah mengetahui hal tersebut?
 - Apakah sudah ada cara menyelesaikan masalah pada koperasi ICARE?

Tanggapan :

- a. Terkait anggaran workshop ke Manado itu kembali lagi ke pihak management
- b. Terkait workshop yang akan dilakukan di Kalbar kita berupaya menjadi tuan rumah yang baik dengan mengupayakan hal-hal yang diperlukan. Namun, sejauh ini belum mendapat info terkait kegiatan tersebut.
- c. Minggu lalu, team Bu Tietyk dkk, telah melakukan survei kepada 200 responden dan informasi sementara mesti data belum diolah telah terjadi peningkatan produksi padi dan jeruk, telah terjadi peningkatan penggunaan varietas unggul yang cukup massif di lokasi ICARE. Dan ini menjadi kabar yang bagus. Karena penggunaan varietas menjadi komponen pendorong peningkatan produktivitas.
- d. Tentu semua koperasi memiliki dinamika. Sehingga dibentuk pendamping koperasi untuk mendampingi koperasi apabila terjadi masalah dan rutin melakukan

koordinasi.

3. Produksi Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi (4 Ton) – Didik Saifuddin Anshori, S.TP.

Masukkan :

a. Pak Sution

- Lokasi perbenihan di Kakap, perlu didiskusikan karena akan menghadapi musim hujan yang tinggi pada september di khawatirkan lahan akan tergenang.

b. Pak Sanusi

- Kalau mau menawarkan jagung, mesti ada barangnya

Tanggapan :

- a. Saya sudah memikirkan terkait benih untuk dikelola oleh petugas di bidangnya dari mengurus penyimpanan sampai pemasaran. Namun belum diketahui masuk ke tupoksi apa

4. Produksi Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi (Alpukat 2000 Batang) – Trisna Yasi Agung Wibowo, SST.

Masukkan :

a. Pak Sution

- Perlu dilebihkan sedikit grafting untuk cadangan

b. Pak Sanusi

- Apakah pelepasan grafting melalui PNBPN atau diseminasi

Tanggapan :

- a. Sedang diusahakan untuk melebihi grafting, namun bila ada penambahan minta tolong bantuan anggarannya karena anggaran telah menipis di kegiatan Produksi Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi (Alpukat 2000 Batang).
- b. Pelepasan grafting melalui diseminasi dan PNBPN

Sesi II

1. Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi – Sution, S.P., M.P.

Pangan merupakan faktor penting, salah satunya benih, yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Kegiatan produksi benih sumber padi terdiri dari dua jenis, yaitu FS dan SS, dengan total produksi 145 ton (FS 9 ton dan SS 136 ton). Prosedur produksi meliputi pemilihan lokasi penyemaian, persiapan lahan, pengolahan, proses produksi hingga panen, serta penyimpanan dan distribusi di gudang/pemasaran.

Lokasi produksi benih meliputi Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, dan Landak. Luas lahan produksi benih SS mencapai 49 ha, sedangkan FS 4,5 ha. Produksi FS dilakukan di IP2MP Sungai Kakap dan Desa Kecurit (saat ini masih tahap vegetatif karena keterlambatan musim kemarau). Produksi SS dilakukan di Desa Benuang (5 ha) dan Desa Sambora (8 ha), dengan perkiraan panen September 2026 dan target 32,5 ton. Kendala lapangan meliputi serangan tikus, kesulitan air, wereng, kekeringan pada awal pertumbuhan, serta banjir di Landak.

2. Produksi Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi 1 Ton – Linda Yulianda Asri, S.ST., M.P.

Benih merupakan komponen penting dalam peningkatan kualitas produksi. BRMP Kalbar memproduksi benih sumber kedelai di IP2MP Sungai Kakap seluas 1 ha dengan tujuan menghasilkan benih VUB kedelai bermutu, sekaligus mempromosikan dan mendistribusikannya.

Pada Februari dilakukan pemesanan benih kedelai dengan dua varietas, dilanjutkan pengolahan tanah dan penanaman pada Maret. Tahapan meliputi persiapan, penanaman, pemupukan, roguing, hingga panen. Roguing dilakukan dengan membuang tanaman yang menyimpang dari ciri varietas untuk menjaga kemurnian. Kendala yang dihadapi antara lain kekeringan, banjir, serangan hama, dan tikus.

Rencana tindak lanjut meliputi pengukuran kadar air, sortir, pemeriksaan PBT, pengemasan, distribusi, serta penanaman varietas DEGA 1. Produksi saat ini mencapai 600 kg, dengan 190 kg tidak lolos sertifikasi, 150 kg sudah dipacking, dan sisanya dalam proses.

3. Muhammad Arifin Muflih, S.ST., M.P. (Pemberdayaan IP2MP Sungai Kakap)

IP2MP Sungai Kakap memiliki luas lahan ± 12 ha berupa lahan pasang surut dengan komoditas kelapa dalam, padi, kedelai, serta berbagai buah (durian, alpukat, jambu, manggis, mangga, lengkeng, nangka, cempedak, rambutan, sawo, langsung, jeruk, dll.). Tujuan pemberdayaan adalah sebagai kebun koleksi sumber daya genetik pertanian, penghasil benih, diseminasi/show window teknologi, dan kebun produksi.

Kendala yang dihadapi antara lain serangan OPT (tikus dan burung) pada padi dan kedelai. Upaya pengendalian dilakukan dengan insektisida, pemasangan jaring, serta penggunaan suara elang, yang cukup efektif mengurangi gangguan burung. Fasilitas yang masih diperlukan meliputi pintu air, tambahan mesin pompa, perbaikan pagar keliling (sudah diperbaiki ± 100 m), serta pembangunan jembatan permanen untuk mobilitas alat/mesin.

Diskusi dan Saran:

1. Pak Umar:

Kegiatan perbenihan ini berjalan dengan baik, untuk perbenihan tetap fokus karena output akan diukur capaian sertifikasi produk yang dihasilkan. Semoga dipertanaman berikutnya dapat dioptimalkan. Terkait pengendalian burung, Dimana kakap ini dapat mengendalikan hama burung yang sangat banyak.

2. Pak Kasubbag TU

Saran: Semua proposal mempunyai analisis resiko, sehingga dapat membuat analisis resiko agar dapat mencari solusi dan ini dapat dibuat perencanaan untuk kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan. Hal ini dapat menjadi rujukan dalam hal evaluasi. Sehingga arah kegiatan yg dilakukan tidak keluar dari bahasan yg dilakukan.

3. Pak Arifin

Data Produksi: sudah menghasilkan 600 kg, 190 kg tidak lolos ini sudah dilakukan

sertifikasi, 80 kg tidak lolos karena masih 40 persen tidak 70 persen, 150 sudah lolos.

4. Pak Anjar Suprpto

Budidaya kedelai menjadi tantangan karena adaptasi dari subtropis ke tropis. Sertifikasi benih kedelai berbeda dengan padi, masa kadaluarsa lebih pendek sehingga perlu pengawasan ketat. Sarana dan prasarana akan diupayakan untuk mendukung kebun Kakap.

Sesi III

1. Pemberdayaan IP2MP Selakau oleh Pak Sumardianto

Komoditas utama yang kita kembangkan di IP2MP selakau yaitu kelapa dalam, kelapa genjah, jeruk varietas siam, dan perbenihan sawit yang sekarang sudah berumur lima bulan sehingga dua atau tiga bulan kedepan sudah dapat di tanam. Selain itu juga terdapat perbenihan alpukat dengan total output yang akan kita capai yaitu 2000 batang dan rencananya akan di laksanakan juga perbenihan jagung seluas 0,5 ha.

Untuk capaian kinerja yang telah tercapai yaitu pengelolaan layanan perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana, pemanfaatan lahan kebun selakau, (kebun kelapa seluas 3 ha, kebun induk kelapa 2,5 ha, kelapa dalam 1 ha, kelapa genjah 0,5 ha, kebun jeruk siam seluas 1 ha).

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM sehingga dengan keterbatasan yang ada kami tetap mengoptimalkan perawatan kebun sebisa mungkin, kurangnya alokasi untuk pemeliharaan kebun seperti herbisida, pestisida dan pupuk. Dengan adanya kendala kendala di atas kami mengharapkan adanya tambahan THL untuk kegiatan seperti perbenihan atau pun kegiatan perawatan kebun yang lainnya.

2. Pemberdayaan IP2MP Monterado oleh Pak lukman.

Progres kegiatan sampai dengan bulan juni 2026, Luas kebun kita ada 159 Ha dengan komoditi yang ada adalah sawit, jeruk dan lada. Untuk kegiatan di kebun ini sebagai kebun benih, kebun produksi dan sebagai kebun desiminasi untuk benih. Untuk kegiatan sampai saat ini kami melaporkan dari bulan april, mei juni, untuk kegiatan kelapa sawit dilakukan kegiatan rutin yaitu pembersihan gulma, pruning dan baru dilakukan pemupukan di sawit produksi. Kemudian untuk jeruk, dan lada juga dilakukan kegiatan rutin pembersihan, pemeliharaan alsintan.

Untuk kendala yang dihadapi yaitu masalah gulma, kekurangan SDM sehingga cukup kewalahan, serangan hama dan penyakit, jika curah hujan tinggi maka bagian lembah akan banjir, kemudian penyerobotan lahan oleh warga sekitar kebun IP2MP simpang monterado Kemudian untuk parit-parit sudah kita normalisasikan dan akan kita lanjutkan jika ada rejeki lagi. Kemudian kita juga menjalin kerja sama dengan petani yang mau melakukan budidaya tanaman umur pendek sehingga dapat memanfaatkan lahan kita yang ada.

3. Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern (PM-AAS/Padi Sehat) oleh Didik Saifuddin Anshori, S.T.P.

Kegiatan PM-AAS dilakukan di kabupaten sambas, di desa sungai kelambu, pusaka, mensere, semparuk dan singlaraya. Luas target demfarm 100 ha, realisasi tanam yaitu 76 ha, kondisi tanaman, kondisi pertanaman sampai dengan sekarang, fase pertumbuhan dominan (primordia), terdapat serangan tikus dan keong di desa sungai kelambu, ulat penggulung daun di desa mensere.

Kendala utama di kegiatan ini yaitu di administrasi yang prosesnya sedikit rumit, kekeringa, sebagian besar petani sudah terbiasa dengan model tanam pindah sehingga belum terbiasa dengan sistem tanam tabela, tanam tabela memerlukan pengolahan lahan yang sempurna sedangkan sebagian lahan belum diolah secara sempurna.

4. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (Termasuk Verifikasi, Monitoring, Banper dan CPCL) oleh pak Agus Subekti, S.P., M.P.

Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sebagai upaya mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Pendampingan dilakukan melalui pengawalan berbagai program strategis, antara lain Luas Tambah Tanam (LTT), cetak sawah, Brigade Pangan, verifikasi dan validasi CPCL bantuan pemerintah, koordinasi pendayagunaan penyuluh, serta monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan, capaian LTT Kalimantan Barat bulan Juli 2026 target 23.275 ha total capaian sampai saat ini sebesar 79% total 18.278.38.

Kendala yang dihadapi penyampaian data LTT harian dari beberapa kab/kota masih belum konsisten sehingga terdapat data yang terlambat disampaikan, penyelesaian CPCL masih menghadapi beberapa kendala yaitu penyuluh belum sepenuhnya memahami pembuatan polygon sebagai syarat usulan CPCL.

Rencana tindak lanjut Melaksanakan koordinasi dan evaluasi capaian Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai upaya pengawalan target swasembada pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat, Menyelenggarakan rapat evaluasi penyusunan dan penyelesaian Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) secara berkala bersama Katimker, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Melakukan sinkronisasi data dan koordinasi dengan Dinas Pertanian, PPL, serta unit Eselon I Kementerian Pertanian terkait perkembangan pelaksanaan program strategis di Provinsi Kalimantan Barat.

5. Kegiatan Penyuluh Pertanian oleh Pak Wahyudi, S.Pt.

Sejak april 2026 telah menerima 440 usulan administrasi pegawai di CWS, usulan kenaikan gaji berkala 334 usulan, kenaikan pangkat 43 usulan, uji kompetensi 15 usulan. Kegiatan penyuluh Prov Kalimantan barat. Laporan luas tambah tanam, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, pengimputan RDKK Pupuk Subsidi, Survei Lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR), Pemanfaatan Irigasi Perpompaan dan Perpipaan, Penderasan Materi dan Informasi Pembangunan Pertanian Serta Kelompencapir Digital, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Brigade Pangan (BP), Pendampingan CPCL bantuan Pemerintah, Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Distribusi Pupuk Subsidi dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Penyuluh Pertanian.

LTT Periode Januari – Juli 2026 (s.d 25 Juli 2026) ringkasan kumulatif 132.443, 67 hektar. Kendala utama yang dihadapi dilapangan yaitu, SDM Penyuluh Pertanian

(Defisit tenaga penyuluh pertanian), tantangan lahan pasang surut, keterbatasan fisik alat pertanian dan ketiadaan anggaran khusus. Solusi strategis digitalisasi dan peningkatan kapasitas, implementasi teknologi spesifik lokasi, optimalisasi penggunaan alsintan dan inisiatif swadaya penyuluh.

Diskusi dan Tanya Jawab.

Tanggapan Kepala Balai Besar BRMP Kalimantan Barat

Yang pertama terkait sarana dan prasarana kebun karena PNPB sudah terbuka berarti kita bisa anggarkan. Dua atau tiga tahun yang lalu PNPB tertutup sehingga kebun sudah menyeter tapi kita tidak bisa merealisasikan

Yang kedua terkait dengan program pendampingan di harapkan untuk tertib administrasi, selain arsip digital juga arsip fisik, karena arsip fisik inilah yang kita kumpulkan di BRMP, kemudian jika terdapat perubahan perubahan pada lampiran kegiatan tolong dilampirkan saat penandatanganan supaya kita punya arsip yang jelas.

Kemudian terkait dengan penyuluh, diharapkan kita bisa satu misi atau satu pandangan agar program kementerian pertanian bisa lebih cepat telaksana, komando dari pusat langsung ke bawah. Sebagai salah satu contoh kegiatan CPCL bagaimana kita melaksanakan percepatan CPCL ini agar tidak terhambat oleh karena itu kita satu misi dulu, ujung tombak kita adalah teman-teman penyuluh di BKPP di wilayahnya. Jika perlu verifikasi CPCL lebih dalam kita harus tanya ke penyuluh, baik korlu, maupun katimker. Sekali lagi diharapkan administrasi dan dokumentasi di tertibkan

Pak trisna:

Terkait kontak person ijin pak didik kami berikan nomor terlfon untuk memberikan informasi terkait PM-AAS.

Jawaban: kami siap memberikan informasi terkait PM-AAS

Bu tityk:

Bagaimana cara pencantuman gelar untuk PPPK penyuluh pertanian.? (pertanyaan untuk Penyuluh pak wahyudi)

Jawaban: Kami masih menunggu link dari pusat, lalu kita bisa isi, biasanya dalam waktu 2 hari harus selesai. Untuk PPPK awalnya memang tidak ada pencantuman gelar tapi katanya sekarang baru ada, tapi belum ada linknya, kami masih menunggu jika ada akan kami sampaikan. Dan sedikit saran untuk kegiatan berikutnya tolong libatkan penyuluh sehingga kita tahu apa saja kegiatan yang sedang dilaksanakan. Di perlukan perbaikan kolaborasi.

Tanggapan Pak TU: Tidak ada maksud BRMP untuk tidak menginformasikan kepenyuluh.

Tanggapan pak agus: Tidak selalu informasi yang kita terima bersifat resmi, informasi berjalan ketika ada zoom dan tidak ada surat resmi, kami sudah membangun sistem informasi sehingga semua bisa melihat secara real time. Kalau memungkinkan misalnya penyuluh tolong bisa di buka link tersebut untuk melihat perkembangan CPCL. Terkait juknis kita sudah ada di link hingga bisa di akses semua pihak terkait. Dan terkait yang iCARE setahu saya sebelum dilakukan penguplotan di E-banper, kami sudah menginfokan kepada pak wahyudi bahwa akan dilaksanakan zoom, dan dalam pertemuan tersebut informasi CPCL di bahas. Kemudian terkait pelaporan terkait komponen C kami tidak pernah tahu program yang dilaksanakan dalam komponen C.

Saran untuk pak Didik: Program perkembangan PM-AAS dan untuk pelaporan mohon di perhatikan rambu-rambu piloting.

Pak Kabag TU:

Tugas tugas pak KBB dan penyuluh sangat besar sehingga kita harus berjalan bersama, bila diperlukan tim verifikasi penyulu dan tim verifikasi BRMP bekerja bersama sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Contoh kegiatan ICARE kemarin informasi CPCL belum sampai ke penyuluh sehingga di harapkan bisa bekerja sama.

Untuk pak wahyudi nanti silahkan di rincikan untuk keperluannya sehingga kita bisa anggarkan.

DOKUMENTASI KEGIATAN



